

# LAPORAN KINERJA

**2017**

**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI MAKASSAR**



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Gambaran Umum Organisasi .....	1
1.2 Struktur Organisasi .....	2
1.3 Aspek Strategis .....	3
1.4 Isu Strategis .....	4
<b>BAB 1 PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>6</b>
2.1 Rencana Strategis .....	6
2.2 Perencanaan Kinerja Tahunan .....	13
2.3 Kriteria Pencapaian Indikator .....	16
<b>BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>18</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	18
3.2 Realisasi Anggaran .....	46
3.3 Analisis Efisiensi Kegiatan .....	48
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	<b>50</b>
4.1 Kesimpulan .....	50
4.2 Saran .....	50
<b>LAMPIRAN</b> .....	

## KATA PENGANTAR



Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM, perlu menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas semua kinerja di BBPOM di Makassar yang telah dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar Tahun 2017.

Di tahun 2017, Balai Besar POM di Makassar telah berupaya meningkatkan kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan mendukung peningkatan daya saing obat dan makanan sebagaimana visi Badan POM yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2017 ini menggambarkan capaian kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan di awal tahun, beserta analisisnya. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tahun 2017, akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja tahun berikutnya.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban Balai Besar POM di Makassar dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Badan POM ke depan.

Makassar, Februari 2018



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Besar POM di Makassar sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja kepada Kepala Balai Besar POM di Makassar, di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Balai Besar POM di Makassar dan upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Secara umum, dalam tahun 2017 BBPOM di Makassar telah mencapai target kinerja. Dari 3 sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra 2015-2019, 2 Sasaran strategis dinyatakan “memuaskan” yaitu dengan capaian > 100% untuk sasaran strategis Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan dan Meningkatkan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat. Sedangkan 1 sasaran strategis lainnya, yaitu Menguatnya Kualitas kapasitas kelembagaan Badan POM tercapai dengan kriteria “cukup”. Pencapaian ketiga sasaran strategis ini diukur dengan 8 (delapan) indikator kinerja, yang 5 (lima) diantaranya merupakan indikator Kinerja Utama (IKU) Adanya reviu Renstra 2015-2019 yang dilakukan pada tahun 2017 turut memberikan pengaruh pada persentase capaian kinerja tahun 2017.

Pagu anggaran Balai Besar POM di Makassar sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja Balai Besar POM di Makassar tahun 2017 adalah Rp 41.050.832.000,00 (Empat puluh satu milyar Lima puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Dari total anggaran, terealisasikan sebesar Rp 37.093.616.332,00 (Tiga puluh milyar Sembilan puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) atau 90,36%.

Untuk mengatasi berbagai masalah yang masih ditemui dalam pengawasan obat dan makanan khususnya di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Makassar dilakukan beberapa upaya diantaranya :

1. Pemutakhiran kembali data sarana dan prasarana produksi, distribusi obat dan makanan, maupun pelayanan kesehatan yang ada di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Makassar.
2. Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor terkait, dan



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Makassar Periode 2015-2019 .....	13
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2017 .....	15
Tabel 3.1	Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2017 .....	20
Tabel 3.2	Realisasi dan Capaian Indikator Kegiatan Sasaran Strategis 1 .....	31
Tabel 3.3	Realisasi Sampling dan Pengujian Tahun 2017 .....	32
Tabel 3.4	Realisasi Indikator Kegiatan Jumlah Perkara di Bidang Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Makassar Tahun 2017 .....	36
Tabel 3.5	Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 .....	37
Tabel 3.6	Perbandingan realisasi Sasaran Strategis 2 terhadap target 2019 .....	39
Tabel 3.7	Realisasi Indikator Kegiatan Sasaran Strategis 2.....	40
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kapasitas BPOM .....	43
Tabel 3.9	Kriteria penilaian SAKIP .....	43
Tabel 3.10	Perbandingan realisasi Nilai SAKIP Balai Besar POM di Makassar Tahun 2016 terhadap realisasi tahun 2015 dan target 2019 .....	44
Tabel 3.11	Capaian Indikator Kegiatan Sasaran Strategis 3.....	45
Tabel 3.12	Sasaran Strategis dan Realisasi Anggarannya .....	46
Tabel 3.13	Realisasi anggaran dari setiap indikator kegiatan tahun 2017 .....	47
Tabel 3.14	Nilai TE dan kategori efisiensi indikator kegiatan .....	49

# PENDAHULUAN

# 1

## 1.1 Gambaran Umum Organisasi

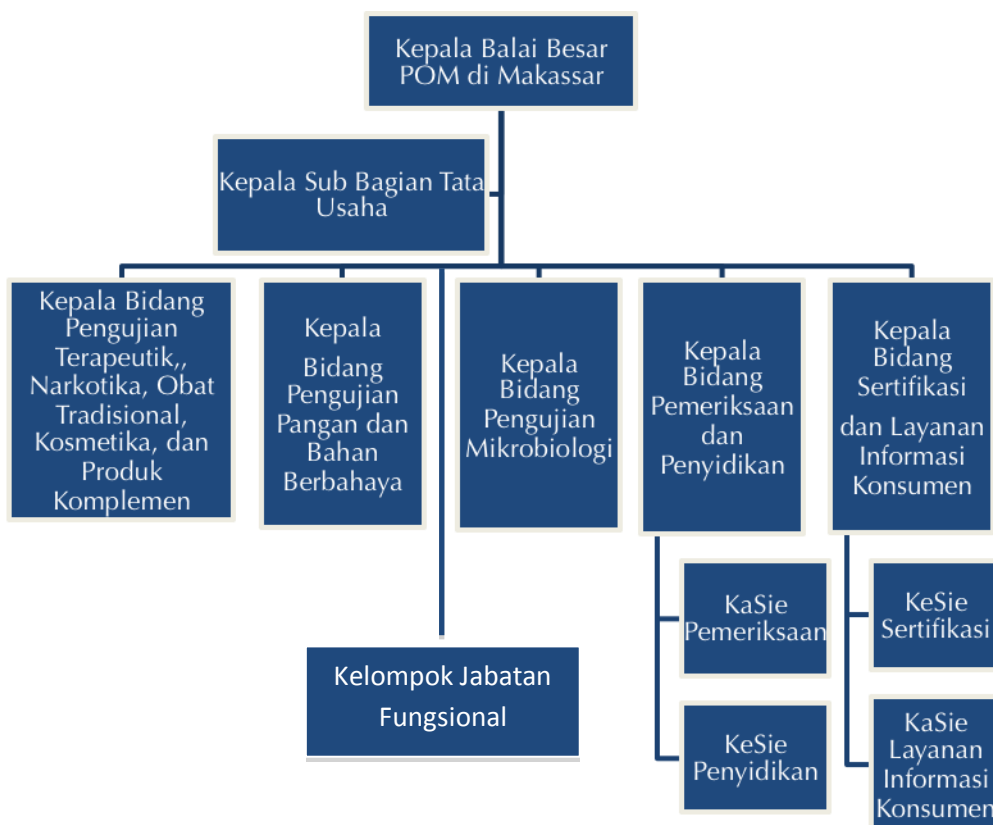
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Balai Besar POM di Makassar yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI di Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok	Fungsi
Melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.	<ol style="list-style-type: none"><li>Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan;</li><li>Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutik, narkotika, psikotropika zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya;</li><li>Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi;</li><li>Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi;</li><li>Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum;</li><li>Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala BPOM</li><li>Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen;</li><li>Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan;</li><li>Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan; dan</li><li>Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala BPOM, sesuai dengan bidang tugasnya.</li></ol>

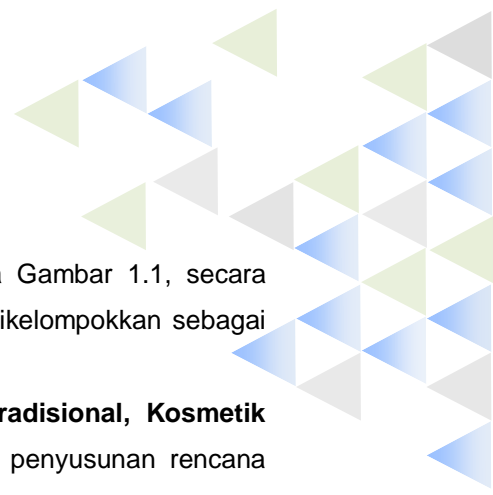
Tugas dan fungsi tersebut melekat pada Balai Besar POM di Makassar yang merupakan garda terdepan dalam hal perlindungan terhadap konsumen di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu Balai Besar POM di Makassar selalu berupaya untuk memenuhi harapan masyarakat sekaligus mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

## 1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar/ Balai POM disusun berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014.



Gambar 1.1  
Bagan Struktur Organisasi BBPOM di Makassar



Berdasarkan dengan struktur organisasi yang ada pada Gambar 1.1, secara garis besar unit-unit kerja Balai Besar POM di Makassar dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- **Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk komplemen** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang produk terapeutik, narkotika, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen
- **Bidang Pengujian Pangan dan bahan Berbahaya** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya
- **Bidang Pengujian Mikrobiologi** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu secara mikrobiologi
- **Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutik, Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik, Produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya
- **Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen** tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu dan layanan informasi konsumen
- **Subbagian tata Usaha** mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Balai Besar POM di Makassar

### 1.3 Aspek Strategis

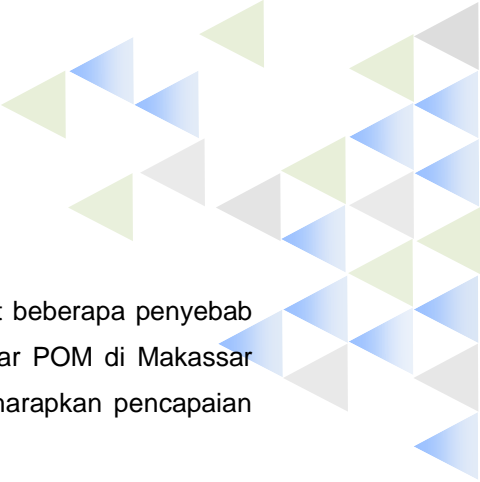
- ❖ Letak geografis Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di tengah – tengah kepulauan Indonesia, dengan Selat Makassar yang telah ditetapkan sebagai salah satu jalur pelayaran internasional, menjadikannya sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia yang tidak pernah sepi dari aktifitas perdagangan baik domestik, maupun internasional. Kondisi ini menjadi poin penting peran Balai Besar POM di Makassar dalam melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan yang beredar. Beberapa aspek penting yang menjadi fokus pengawasan Balai Besar POM di Makassar antara lain :

- ❖ Pusat perdagangan Obat dan Makanan di Wilayah Indonesia Timur
- ❖ Komoditi yang banyak beredar di Sulawesi Selatan dan Barat berdasarkan jumlah dan nilai adalah Kosmetik yang Tanpa Ijin Edar dan atau mengandung Bahan Berbahaya,
- ❖ Obat tertentu yang sudah dibatalkan izin edarnya masih ditemukan beredar di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
- ❖ Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat merupakan daerah penghasil produk perikanan dan perkebunan khususnya produk kakao (berdasarkan Surat Keterangan Ekspor yang diterbitkan) jadi diperlukan pengawasan terhadap kontaminasi Bahan Berbahaya sebelum diolah dengan bersinergi dengan SKPD terkait.
- ❖ Kompetensi Laboratorium BBPOM di Makassar sebagai Laboratorium unggulan untuk Pengujian Bioteknologi dan Laboratorium rujukan untuk pengujian Disolusi dan Bahan Tambahan Pangan untuk wilayah Indonesia Timur.

#### 1.4 Isu Strategis

Pelaksanaan peran dan fungsi BBPOM di Makassar tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan target hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan permasalahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat, antara lain:

1. Proses distribusi produk yang semakin mudah ke wilayah Indonesia timur termasuk di dalamnya adalah produk illegal
2. Banyaknya pelabuhan kecil termasuk di border area yang tidak dapat dikawal secara intensif oleh BBPOM di Makassar dan Bea Cukai
3. Perdagangan bebas Obat dan Makanan illegal melalui media online
4. Semakin banyak produsen peracik rumahan kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) dan atau mengandung Bahan Berbahaya (BB)
5. Maraknya penjualan kosmetik TIE dan atau mengandung BB secara Online
6. Rendahnya pengetahuan produsen peracik rumahan kosmetik TIE dan atau mengandung Bahan Berbahaya (BB)
7. Distribusi Obat tertentu tersebut disalurkan bukan oleh sarana yang berhak atau perorangan
8. Proses penarikan dan pemusnahan produk tersebut kemungkinan tidak tuntas
9. Belum sinerginya lintas sektor terkait dalam mengawasi produk perikanan.
10. Keterbatasan jumlah peralatan pengujian utama untuk melakukan uji rujuk dan uji absah.



Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas terdapat beberapa penyebab yang dianggap sangat krusial dan strategis bagi fungsi Balai Besar POM di Makassar dalam melakukan pembenahan di masa mendatang, sehingga diharapkan pencapaian kinerja berikutnya akan lebih optimal.

Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas Balai Besar POM di Makassar sebagai Institusi Pengawas Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat masih perlu terus dilakukan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dari sisi manajemen sumber daya manusianya, agar pencapaian kinerja di masa datang semakin membaik dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang lebih ketat dan baik dalam menjaga keamanan, mutu serta khasiat/manfaat Obat dan Makanan tersebut, yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan masyarakat.

# PERENCANAAN STRATEGIS

## 2

### 2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar periode 2015-2019 telah mengacu pada Rencana Strategis Badan POM periode 2015-2019. Penyelarsan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Makassar sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dituntut untuk dapat menjamin keamanan, mutu, manfaat/khasiat Obat dan Makanan tersebut sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk itu, Balai Besar POM di Makassar telah menetapkan visi, misi dan tujuan serta sasarannya, yang sejalan dengan visi dan misi Badan POM.

**Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa**

*Visi*

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut:

#### **Aman**

Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin dapat ditoleransi tidak membahayakan saat digunakan pada manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat Obat dan Makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya terjamin.

### **Daya Saing**

Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional, sehingga produk lokal unggul dalam menghadapi pesaing di masa depan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut :

## *Misi*

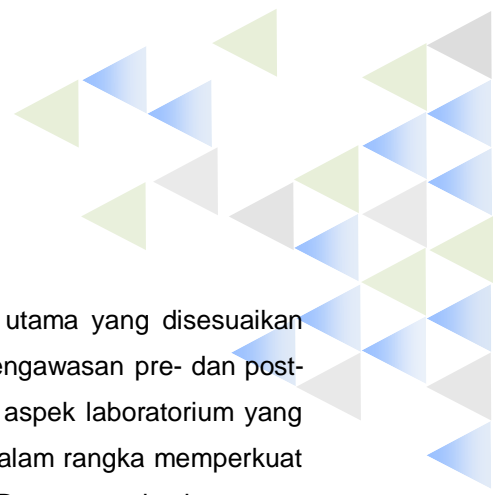
---

**Meningkatkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis resiko untuk melindungi masyarakat**

**Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.**

**Meningkatkan kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Makassar**

---



Misi Balai Besar POM di Makassar merupakan langkah utama yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Makassar. Pengawasan pre- dan post-market berstandar internasional didukung dengan perkuatan dari aspek laboratorium yang terakreditasi sesuai ISO:IEC 17025 tahun 2008 yang diterapkan dalam rangka memperkuat Balai Besar POM di Makassar menghadapi tantangan globalisasi. Dengan penjaminan mutu produk obat dan makanan yang konsisten, yaitu memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Makassar mampu melindungi masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan khususnya, dan Indonesia pada umumnya dengan optimal.

Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip organisasi pembelajar (*learning organization*). Untuk mendukung itu, maka Balai Besar POM di Makassar perlu untuk memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta saling bertukar informasi (*knowledge sharing*) dengan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa kegiatan terpadu yang melibatkan instansi terkait pengawasan obat dan makanan baik pusat maupun daerah.

Untuk mewujudkan visi, misi, serta menjalankan peta strategis tersebut, Balai Besar POM di Makassar telah menyusun sasaran strategis periode 2015-2019 dengan mempertimbangan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Sasaran strategis yang ditetapkan mengacu pada sasaran strategis Badan POM tahun 2015-2019.

## **SASARAN STRATEGIS 1**

### **Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan**

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Makassar merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan *pre-market* dan *post-market*. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Balai Besar/Balai POM di 33 provinsi, termasuk Balai Besar POM di Makassar.

Pengukuran terhadap sasaran strategis ini dilakukan dengan menggunakan 5 indikator, yang terdiri dari :

1. Persentase obat yang memenuhi syarat, dengan target 94% pada akhir 2019,
2. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat, dengan target 84% pada akhir 2019,

3. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat, dengan target 93% pada akhir 2019,
4. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat, dengan target 83% pada akhir 2019,
5. Persentase makanan yang memenuhi syarat, dengan target 90,1% pada akhir 2019.

Adapun definisi operasional dari Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 adalah:

Indikator Kinerja	Defenisi Operasional
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obat yang mendapat nomor izin edar (NIE) dari Badan POM</li> <li>• Yang dimaksud dengan obat adalah obat bebas, bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika (termasuk Obat Tradisional)</li> <li>• Obat memenuhi syarat ditetapkan melalui hasil pengujian laboratorium</li> <li>• Kategori obat yang disampling sesuai dengan pedoman sampling obat dan makanan</li> <li>• Jumlah produk obat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dihitung berdasarkan satuan bets</li> </ul>
Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obat Tradisional yang mendapat nomor izin edar (NIE) dari Badan POM</li> <li>• Obat Tradisional memenuhi syarat ditetapkan melalui hasil pengujian laboratorium</li> <li>• Kategori obat Tradisional yang disampling sesuai dengan pedoman sampling obat dan makanan</li> </ul>
Persentase Kosmetika yang Memenuhi Syarat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kosmetika yang mendapat nomor izin edar (NIE) dari Badan POM</li> <li>• Kosmetika memenuhi syarat ditetapkan melalui hasil pengujian laboratorium</li> <li>• Kategori kosmetika yang disampling sesuai dengan pedoman sampling obat dan makanan</li> </ul>
Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suplemen Kesehatan yang mendapat nomor izin edar (NIE) dari Badan POM</li> <li>• Suplemen Kesehatan memenuhi syarat ditetapkan melalui hasil pengujian laboratorium</li> <li>• Kategori Suplemen Kesehatan yang disampling sesuai dengan pedoman sampling obat dan makanan</li> </ul>
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makanan yang mendapat nomor izin edar (NIE) dari Badan POM</li> <li>• Makanan memenuhi syarat ditetapkan melalui hasil pengujian laboratorium</li> <li>• Kategori Makanan yang disampling sesuai dengan pedoman sampling obat dan makanan</li> </ul>

## SASARAN STRATEGIS 2

### **Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat.**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Untuk itu perlu dijalin suatu kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang baik.

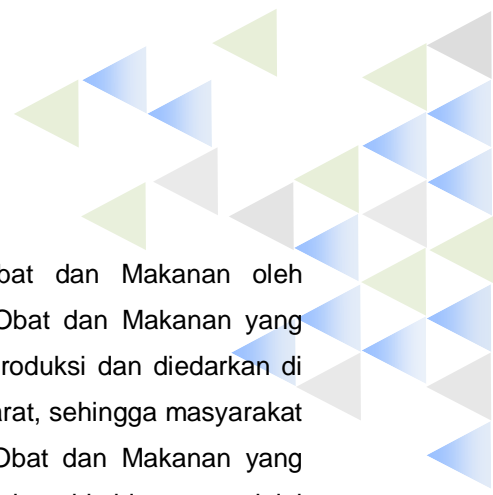
Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, khasiat/ bermanfaat dan bermutu) melalui proses produksi yang sesuai dengan ketentuan.

Tanpa meninggalkan tugas utama pengawasan, Balai Besar POM di Makassar berupaya memberikan dukungan kepada pelaku usaha untuk memperoleh kemudahan dalam usahanya yaitu dengan advokasi dan edukasi secara kepada pelaku usaha serta pendampingan regulatory. Masing-masing bidang di Balai Besar POM di Makassar mempunyai upaya yang berbeda dalam memberikan dukungan *regulatory*, sesuai dengan tugas dan fungsi bidangnya.

Kerjasama yang telah dilakukan oleh Balai Besar POM di Makassar belum dilakukan dengan program yang terukur dan sistematis. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan kinerja maka Balai Besar POM di Makassar senantiasa melakukan evaluasi terhadap semua program dan kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung perencanaan kegiatan selanjutnya. Kerjasama dengan berbagai pihak termasuk masyarakat sangat strategis dalam menopang tugas pengawasan Obat dan Makanan yang menjadi mandat Balai Besar POM di Makassar.

Untuk memastikan bahwa kerjasama ini bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan, maka harus disusun kesepakatan (MoU) yang mengikat kedua belah pihak dengan mengacu pada tujuan kerjasama yang telah disepakati termasuk mekanisme dan sistem monitoring dan evaluasi.

Komunikasi yang efektif dengan mitra kerja di daerah merupakan hal yang wajib dilakukan, baik oleh Pusat maupun BB/Balai POM sebagai tindak lanjut hasil pengawasan. Untuk itu, Memasuki tahun kedua periode renstra BBPOM di Makassar perlu melakukan pertemuan koordinasi dengan dinas terkait, setidaknya dua kali dalam satu tahun. Hal ini diutamakan untuk pertemuan koordinasi dalam pengawalan obat dalam Jaminan Kesehatan Nasional.



Selain itu, terkait dengan subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, BBPOM di Makassar melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

1. Jumlah Industri Obat Tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB, dengan target kumulatif 81 IOT pada tahun 2019,
2. Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan, dengan target kumulatif 205 industri kosmetika pada tahun 2019,
3. Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan, dengan target kumulatif 11% industri pangan olahan pada tahun 2019,
4. Peningkatan indeks kesadaran masyarakat dengan target meningkat pada akhir 2019 dibandingkan baseline 2016, dan
5. Jumlah kerjasama yang diimplementasikan, dengan target kumulatif pada akhir 2019 sebanyak 20 kerjasama.

### **SASARAN STRATEGIS 3**

#### **Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Balai Besar POM di Makassar**

Sejalan dengan aturan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, Balai Besar POM di Makassar berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bertujuan melayani dan berkinerja tinggi sehingga menyebabkan kualitas pelayanan publik Balai Besar POM di Makassar akan meningkat.

Pada tahun 2017, memasuki tahun ketiga periode Renstra 2015-2019, Balai Besar POM di Makassar berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Sumber daya meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Balai Besar POM di Makassar untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada

akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Selain itu, untuk mendukung Sasaran Strategis 1 dan 2, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, yang menjadi indikatornya adalah Nilai SAKIP Balai Besar POM di Makassar berdasarkan Hasil penilaian dari tim APIP Inspektorat Badan POM, dengan target A pada tahun 2019.

Adapun ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM periode 2015-2019 sesuai dengan penjelasan di atas, adalah sebagai berikut :

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa	Meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis resiko untuk melindungi masyarakat	Meningkatnya jaminan produk obat dan makanan aman	Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase Obat yang Memenuhi Syarat</li> <li>▪ Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat</li> <li>▪ Persentase Kosmetika yang Memenuhi Syarat</li> <li>▪ Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat</li> <li>▪ Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat</li> </ul>
	Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan obat dan makanan serta memperluas kemitraan dengan pemangku kepentingan Meningkatkan kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Makassar	Meningkatnya daya saing obat dan makanan di pasar lokal dan global	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Meningkatkan Kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Makassar

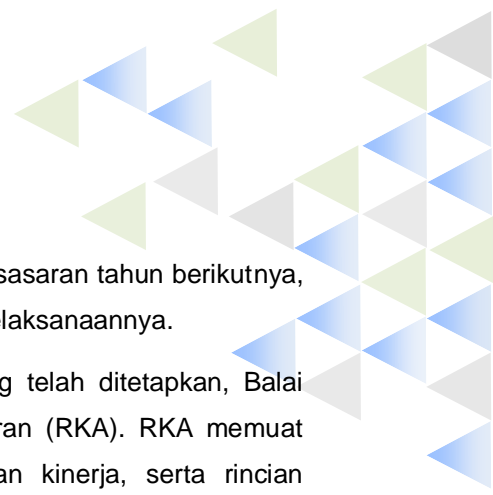
Dari indikator kinerja tersebut di atas, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Makassar adalah :

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat
2. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat
3. Persentase Kosmetika yang Memenuhi Syarat
4. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat
5. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

## 2.2 Perencanaan Kinerja Tahunan

### 2.2.1 Rencana Kinerja Tahunan

Dengan memperhatikan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan berpedoman pada Renstra, Kementerian Keuangan menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program induk. Renja dirinci menurut



indikator output, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya.

Berdasarkan RKP dan pagu anggaran serta Renja yang telah ditetapkan, Balai Besar POM di Makassar menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA memuat informasi kinerja yang meliputi program, kegiatan dan sasaran kinerja, serta rincian anggaran antara lain : output, komponen input, jenis belanja dan kelompok belanja.

Hal lain yang masih harus dilakukan oleh Balai Besar POM di Makassar dalam rangka pencapaian strategi organisasi dan peningkatan kinerja adalah penyusunan kontrak kinerja individu sampai dengan pelaksana berdasarkan tugas fungsi serta IKU yang cascade dari atasan. Kontrak kinerja untuk level organisasi di mulai sejak tahun 2015, sedangkan kontrak kinerja untuk semua pegawai BBPOM di Makassar dimulai pada tahun 2014 hanya pada tataran pada tugas fungsi namun belum sesuai dengan IKU level unit organisasi atau IKU yang cascade.

Penyusunan dokumen Renja oleh Badan POM, RKA oleh BBPOM di Makassar dan kontrak kerja telah melalui tahapan konsultasi dan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM. Sinergitas yang telah dilakukan ini diharapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang terintegrasi dengan strategi organisasi dan juga sekaligus mempunyai indikator kinerja selaras pada semua dokumen .

### 2.2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, antara Kepala Balai Besar POM di Makassar sebagai penerima amanah dengan Kepala Badan POM RI sebagai pemberi amanah.

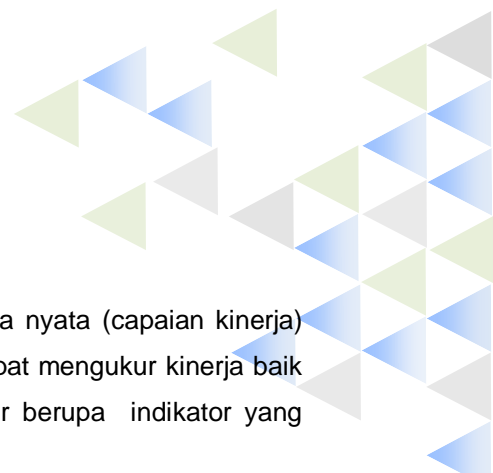
Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka BBPOM di Makassar sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar Tahun 2017 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra BBPOM di Makassar Tahun 2015-2019 (dapat dilihat pada lampiran 2). Selain itu, tujuan dari Perjanjian Kinerja ini adalah menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; sebagai dasar pemberian reward (penghargaan) dan punishment (sanksi) dan sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tabel 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR

NO	SASARAN STRATEGIS/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
<b>SASARAN STRATEGIS</b>				
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	95,00 %
		2	Persentase Produk Obat Tradisional Yang memenuhi Syarat	85,00 %
		3	Persentase Produk Kosmetik yang memenuhi syarat	95,00 %
		4	Persentase Produk Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	95,00 %
		5	Persentase Produk Makanan yang memenuhi syarat	89,00 %
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	1	Tingkat Kepuasan Masyarakat	80,00 %
		2	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	4.00 Kab/Kota
3	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan	Nilai SAKIP BBPOM di Makassar dari Badan POM RI	A	
<b>Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan</b>				
1	Meningkatnya Kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	4307 Sampel
		2	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100%
2	Meningkatnya Kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	14.67%	
3	Meningkatnya Kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	31.38%	
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	14 Perkara	
<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat</b>				
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1	Jumlah layanan publik BB/BPOM	746 Layanan
		2	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	23 Komunitas
<b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM</b>				
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	84,00%	
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10 Dokumen	

Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Makassar :

Rp 41.050.832.000,-



### 2.3 Kriteria Pencapaian Indikator

Pengukuran kinerja adalah membandingkan antara kinerja nyata (capaian kinerja) dengan kinerja yang direncanakan pada tahun berjalan. Untuk dapat mengukur kinerja baik kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. Apabila semakin tinggi angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus di bawah.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin rendah, maka digunakan rumus di bawah.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(100\% - \text{Realisasi})}{(100\% - \text{Target})} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Kinerja Kegiatan. Tidak berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2017 capaian kinerja lebih ditekankan pada indikator *outcome*, namun demikian indikator input dan output tetap menjadi pertimbangan untuk menghitung efisiensi kegiatan.

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Kriteria	Capaian Target Indikator
Memuaskan	$100% < \chi \leq 125%$
Baik	100%
Cukup	$75% \leq \chi < 100%$
Kurang	$\chi < 75%$
Tidak dapat disimpulkan	$\chi > 125%$

Penetapan ini bertujuan untuk :

1. Mencegah rendahnya penetapan target kinerja tahunan.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Mereviu penetapan target kinerja tahunan

# CAPAIAN KINERJA

## 3

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja BBPOM di Makassar tahun 2017 adalah sebesar 98,66% (**Cukup**). Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2015 dan 2016, capaian kinerja BBPOM di Makassar mengalami penurunan seperti yang terlihat pada Gambar di bawah ini. Penurunan capaian kinerja ini dipengaruhi adanya revidasi Renstra sebagai tindak lanjut terhadap realisasi dari beberapa indikator kinerja tahun 2016 dan 2017 yang telah melampaui target di akhir periode Renstra 2015-2019 BBPOM di Makassar.

Capaian kinerja ini merupakan akumulasi dari 3 (tiga) Sasaran Strategis yang ada. Kondisi capaian dari setiap Sasaran Strategis BBPOM di Makassar sampai dengan Desember 2017 seperti penjelasan di bawah ini.

#### 1. Sasaran Strategis 1

Sampai dengan Desember 2017 capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 102,72% (**Memuaskan**) yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 dan 2016 akibat adanya revidasi Renstra tahun 2017 dengan perubahan pada target 2017 yang dinaikkan sekitar 2% s/d 14% dari target yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Renstra 2015-2019.

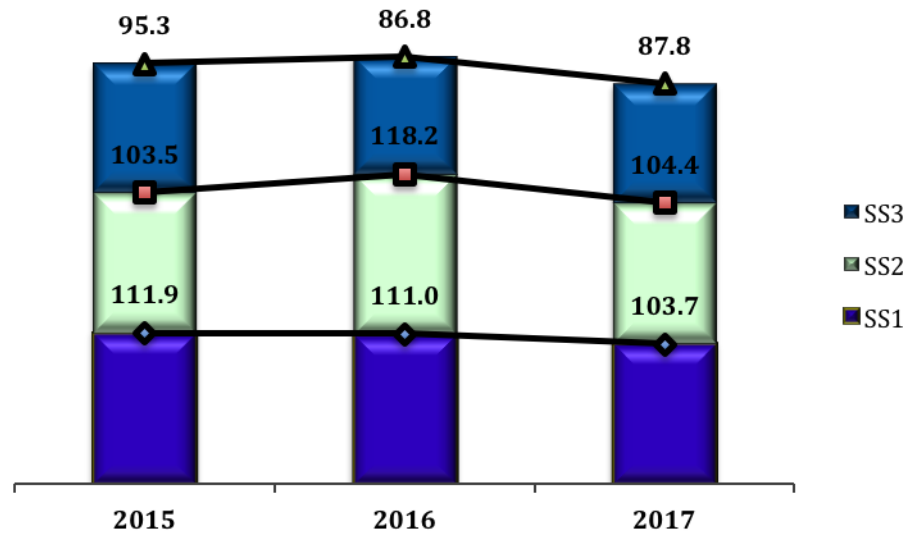
#### 2. Sasaran Strategis 2

Capaian sasaran strategis ini sampai dengan Desember 2017 adalah sebesar 104,42% (**Memuaskan**). Capaian sasaran strategis ini juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 dan 2016 akibat adanya revidasi Renstra.

#### 3. Sasaran Strategis 3

Sasaran strategis ini sampai dengan Desember 2017 menjadi Sasaran strategis dengan nilai capaian kinerja paling rendah dibandingkan sasaran strategis 1 dan 2. Namun demikian, nilai capaian kinerja ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian kinerja sejenis di tahun 2016. Sasaran Strategis ini tidak mengalami revidasi/revisi. Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran strategis ini hanya dilakukan pada satu indikator kinerja.

Sistem pelaporan kinerja yang digunakan Balai Besar POM di Makassar pada tahun 2017 adalah melalui aplikasi online *e-performance.pom.go.id* yang diinput secara rutin setiap triwulan.



Grafik 3.1  
Perbandingan Nilai Capaian Kinerja masing-masing Sasaran Strategis dari tahun 2015 s/d 2017

Adapun secara detail capaian dari setiap Sasaran Strategis BBPOM di Makassar tahun 2017 disajikan pada Lampiran 3. Sedangkan kondisi capaian dari setiap sasaran program dan kegiatan seperti penjelasan pada beberapa bab berikut ini.

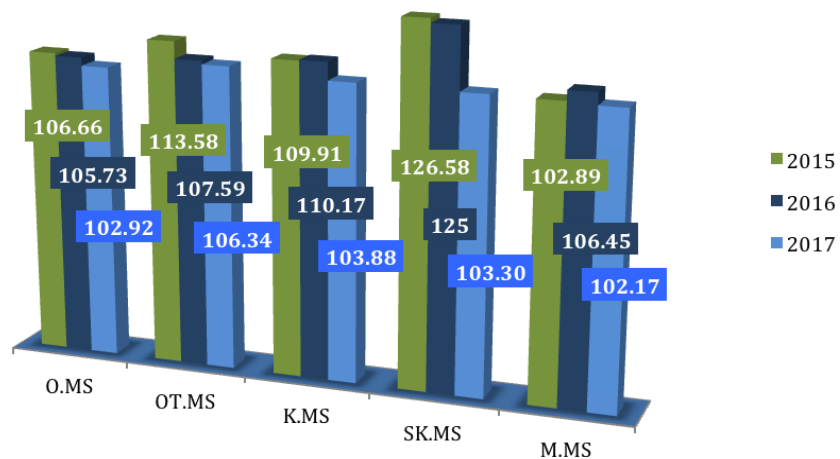
## Sasaran Strategis 1 : Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Pengukuran kinerja dari Sasaran Strategis 1 (SS1) didasarkan pada penilaian terhadap 5 indikator kinerja yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Makassar.

SS 1 : Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target 2017 (%)	Realisasi 2017 (%)	Capaian 2017 (%)	Kriteria
Persentase obat yang Memenuhi Syarat	95,00	97,78	102,92	Memuaskan
Persentase obat Tradisional yang Memenuhi Syarat	85,00	90,39	106,34	
Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat	95,00	98,69	103,88	
Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat	95,00	98,14	103,30	
Persentase makanan yang Memenuhi Syarat	89,00	90,93	102,17	
Rata-rata			103,72	

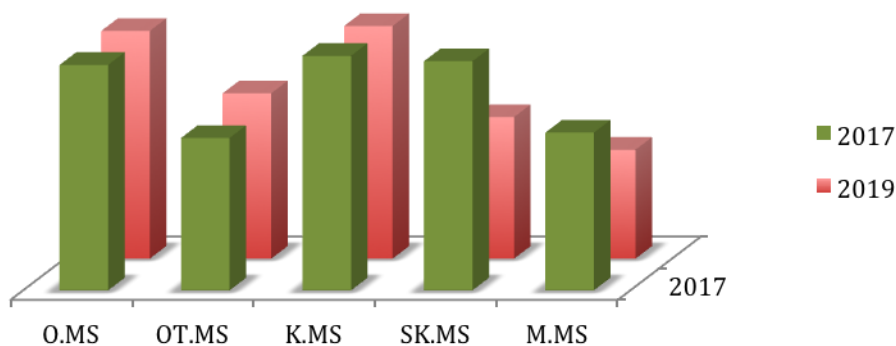
Tabel 3.1 Perbandingan target dan Realisasi Kinerja tahun 2017



Gambar 3.2 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 tahun 2015, 2016, dan 2017

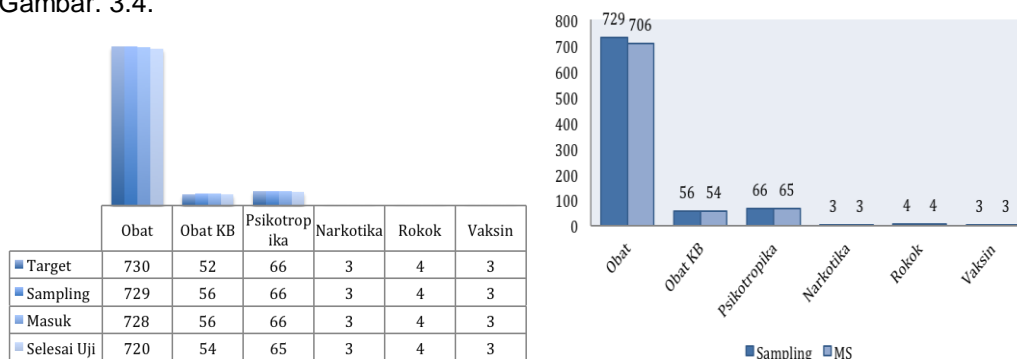
Di tahun 2017 telah dilakukan reviu terhadap Renstra 2015-2019, yang berefek pada perubahan target tahun 2018 s/d 2019. Nilai realisasi tahun 2016 yang telah melampaui target 2019 menjadi alasan dilakukannya reviu tersebut. Dengan demikian, di tahun ketiga periode Restra 2015-2019, nilai realisasi yang diperoleh tahun 2017 masih relevan dengan target tahun 2019.

Gambar 3.3  
Perbandingan Realisasi Kinerja SS1 tahun 2017 dengan target akhir periode Renstra (2019)

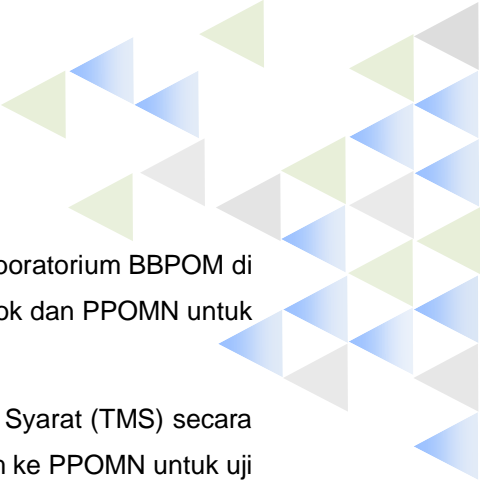


### 1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Pengukuran indikator kinerja ini diukur berdasarkan hasil pengujian laboratorium terhadap produk obat yang memiliki nomor izin edar (NIE) dan telah diuji keseluruhan parameter kritisnya. Jumlah target sampling produk obat tahun 2017 adalah 858 sampel, dan terealisasi sebanyak 861 sampel dengan rekapitan hasil pengujian seperti pada Gambar. 3.4.



Gambar 3.2  
Hasil Sampling dan Pengujian Sampel Obat Tahun 2017



Pengujian produk rokok dan vaksin tidak dapat dilakukan di Laboratorium BBPOM di Makassar, namun dirujuk ke BBPOM di Surabaya untuk sampel rokok dan PPOMN untuk sampel vaksin.

Dari hasil pengujian, 14 item obat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) secara kimia. Seluruh sampel yang tidak memenuhi syarat kemudian dikirim ke PPOMN untuk uji absah.

Di samping melakukan pengujian terhadap Sampel rutin, BBPOM di Makassar juga melakukan pengujian terhadap produk kasus penyalahgunaan obat PCC yang merebak pada pertengahan tahun 2017. Dari hasil pengujian di laboratorium terapeutik, diperoleh hasil tablet tersebut positif mengandung kombinasi Paracetamol, Cafein, dan Carisoprodol sesuai dengan yang telah diprediksikan oleh petugas penyidik.

Dibandingkan dengan nilai target di akhir periode Renstra 2015-2019, nilai realisasi indikator kinerja ini (97,78%) belum melampaui nilai target tahun 2019 (98%) yang berarti, BBPOM di Makassar masih harus meningkatkan kinerja dalam hal pengawasan produk obat yang beredar di Provinsi Sulawesi Selatan.

Menurunnya nilai realisasi ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya diakibatkan kinerja laboratorium pengujian yang sedikit terhambat akibat :

1. Renovasi gedung laboratorium teranakoko
2. Rusaknya beberapa alat utama yang menunjang pengujian yang pengadaannya baru terealisasi di akhir tahun 2017.
3. Pola mutasi pegawai yang menyebabkan berkurangnya personel penguji di laboratorium sedangkan di tahun 2017, tidak ada penambahan pegawai pada laboratorium.

Di tahun 2017 telah dilakukan reuiu Renstra sebagai tindaklanjut terhadap hasil capaian kinerja tahun 2016, dimana nilai target untuk indikator ini dinaikkan menjadi 98% dari target awal sebesar 93%. Penyesuain target ini mengakibatkan penurunan persen capaian kinerja indikator ini (102,92%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (105,73)

Bila dibandingkan dengan nilai capaian dari BBPOM di Surabaya (106,0%), persen capaian untuk indikator ini di BBPOM di Makassar lebih rendah 2,47%. Namun, melihat jumlah dan jenis sebaran produk obat lebih kompleks di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Surabaya memperbesar peluang ditemukannya produk obat yang tidak memenuhi syarat dibandingkan Balai Besar POM di Makassar.

Sampai dengan tahun 2017 belum ada industri farmasi dalam cakupan wilayah pengawasan Balai Besar POM di Makassar, sedangkan pada Balai Besar POM di Surabaya terdapat 40 industri farmasi di wilayah cakupannya.

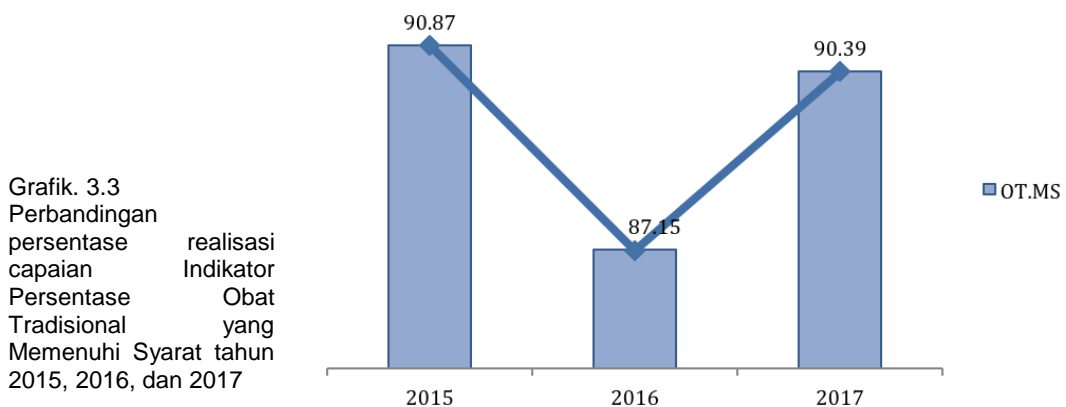
Pencapaian ini telah melebihi target yang telah ditetapkan dan tidak terlepas dari upaya Balai Besar POM di Makassar dalam melakukan pengawasan dan pembinaan, yang antara lain melalui :

- ❖ BBPOM di Makassar secara rutin melakukan pemeriksaan sarana distribusi obat yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dimana jumlah sarana distribusi obat yang diperiksa pada tahun 2017 adalah sebanyak 885 sarana dengan hasil
- ❖ Pemberian sanksi administratif maupun projustitia kepada sarana distribusi resmi dan tidak resmi yang menjual bebas produk obat keras tanpa hak dan kewenangan.
- ❖ Secara aktif melakukan KIE kepada masyarakat melalui kegiatan penyebaran informasi dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat, pelajar, organisasi pemuda, Ibu-ibu PKK, dan dharma wanita dan diharapkan dapat meneruskan informasi tersebut kepada masyarakat di lingkungan dimana mereka berada.

Untuk menjamin keamanan, manfaat dan mutu obat yang sampai kepada masyarakat tetap baik, maka perlu dilakukan pengawasan yang terus menerus dan berkesinambungan terhadap sarana distribusi maupun pelayanan obat, agar selalu menerapkan CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) secara konsisten.

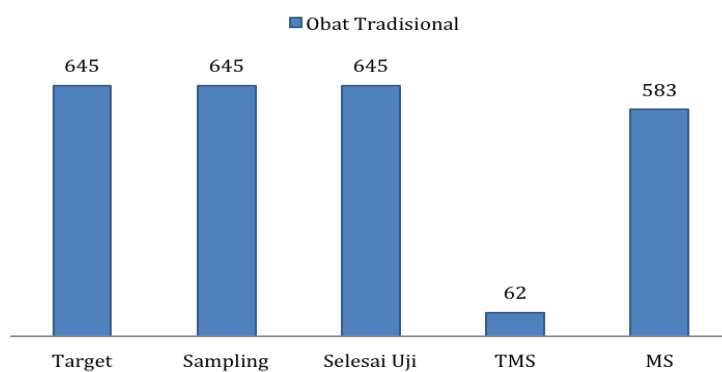
## 2. *Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat*

Indikator kinerja ini dihitung dari jumlah produk Obat tradisional yang Memenuhi Syarat setelah melalui proses pengujian di laboratorium BBPOM di Makassar. Dari 645 sampel yang ditargetkan, terealisasi dengan jumlah yang sama dengan hasil pengujian sebagai berikut:



Capaian persentase obat tradisional yang memenuhi syarat pada tahun 2017 sebesar 106,34% dengan realisasi sebesar 90,39%. Angka realisasi diperoleh dari 583 sampel obat tradisional yang diuji di laboratorium dengan hasil memenuhi syarat dibandingkan dengan 645 sampel obat tradisional yang disampling di wilayah provinsi Sulawesi Selatan sesuai Pedoman Sampling yang ditetapkan oleh Badan POM. Kriteria sampel adalah sampel yang memiliki Nomor Izin Edar (NIE) dan telah diuji seluruh parameter kritisnya. Jenis obat tradisional yang disampling dan diuji antara lain : obat tradisional impor, stamina, pelangsing, pegel linu, nafsu makan, obat kuasi, dan obat tradisional yang dijual secara *online*.

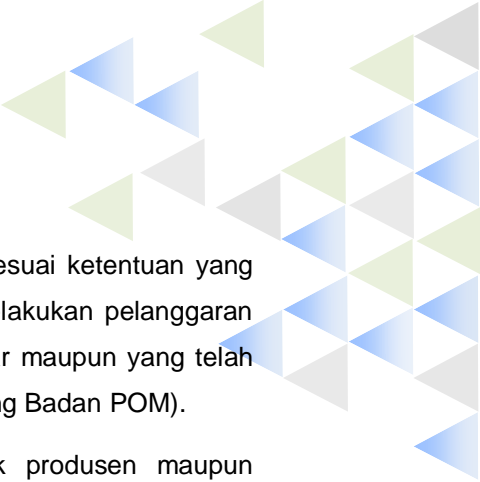
Grafik 4.  
Hasil Pengujian  
Produk Obat  
Tradisional Tahun  
2017



Dibandingkan dengan capaian terhadap indikator yang sama pada tahun 2016 sebesar 107,59% terjadi penurunan sebesar 0,17% sehingga nilai capaiannya adalah 106,34% (**Memuaskan**). Penurunan ini merupakan pengaruh dari adanya penyesuaian kembali target tahun 2017 berdasarkan realisasi tahun 2016 yang telah melebihi target tahun 2019. Nilai realisasi yang meningkat dari realisasi tahun 2016 menunjukkan berkurangnya peredaran obat tradisional yang tidak memenuhi syarat di wilayah Sulawesi Selatan. Hasil pengujian obat tradisional yang tidak memenuhi syarat (62 item sampel) umumnya berasal dari hasil pengujian mikrobiologi (58 item sampel) yaitu pada parameter Angka Lempeng Total, Angka Kapang Khamir, dan identifikasi *Pseudomonas aeruginosa*.

Terhadap target 2019, nilai realisasi ini masih berada 1,31% di bawah target yang telah ditetapkan. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain :

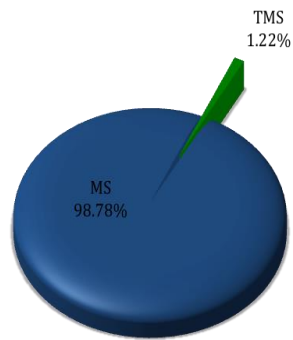
- ❖ Intervensi pengawasan yang dilakukan secara terus menerus terhadap sarana produksi obat tradisional sehingga meningkatkan kepatuhan produsen terhadap peraturan yang berlaku serta pemenuhan penerapan CPOTB (Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik), sehingga tidak ditemukan obat tradisional yang mengandung BKO (Bahan Kimia Obat) sepanjang tahun 2016.

- 
- ❖ Penerapan sanksi (proses projustitia maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana produksi maupun distribusi yang melakukan pelanggaran memproduksi dan atau menjual obat tradisional tanpa ijin edar maupun yang telah dibatalkan Nomor Izin Edarnya dari Badan POM (Public Warning Badan POM).
  - ❖ Pengawasan terhadap pelaku usaha obat tradisional baik produsen maupun distributor masih perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan agar obat tradisional yang beredar di masyarakat memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat.
  - ❖ Penyebaran informasi melalui KIE yang intensif oleh Balai Besar POM di Makassar kepada masyarakat tentang obat tradisional yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat, dan mensosialisasikan cara untuk mengetahui produk yang telah terdaftar di Badan POM dengan mengakses situs web [www.ceknie.pom.go.id](http://www.ceknie.pom.go.id) melalui penyuluhan, leaflet, brosur, pameran, talk show, media massa baik cetak maupun elektronik maupun pembinaan langsung kepada pelaku usaha.
  - ❖ Memfasilitasi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)/ Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT) yang memerlukan bantuan teknis terutama pengujian dalam rangka registrasi.
  - ❖ Melakukan Operasi Gabungan Daerah maupun Nasional bersama pihak Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan berfokus pada pemutusan mata rantai penyebaran obat tradisional yang telah dibatalkan Nomor Izin Edarnya oleh Badan POM maupun obat tradisional dengan Nomor Izin Edar fiktif.

Nilai realisasi terhadap indikator kinerja ini lebih rendah dibandingkan realisasi terhadap indikator kinerja yang sama di Balai Besar POM di Surabaya yaitu sebesar 92,20%.

#### *4. Persentase Kosmetika yang Memenuhi Syarat*

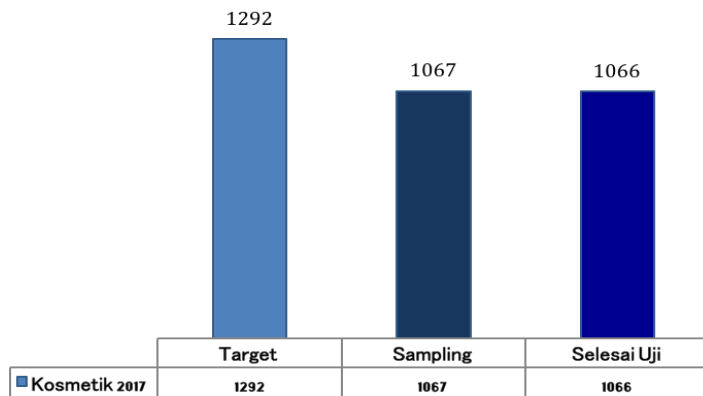
Realisasi persentase Kosmetika yang Memenuhi Syarat berdasarkan hasil pengujian laboratorium Balai Besar POM di Makassar tahun 2017 adalah sebesar 98,69%, dengan nilai capaian sebesar 103,88%. Pengukuran indikator ini dilakukan berdasarkan perbandingan jumlah produk kosmetik yang memenuhi syarat (1053 sampel) berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap jumlah seluruh produk kosmetika yang disampling berdasarkan Pedoman Sampling yang ditetapkan Badan POM.



Gambar 3.5  
Hasil Pengujian Sampel Kosmetik tahun 2017

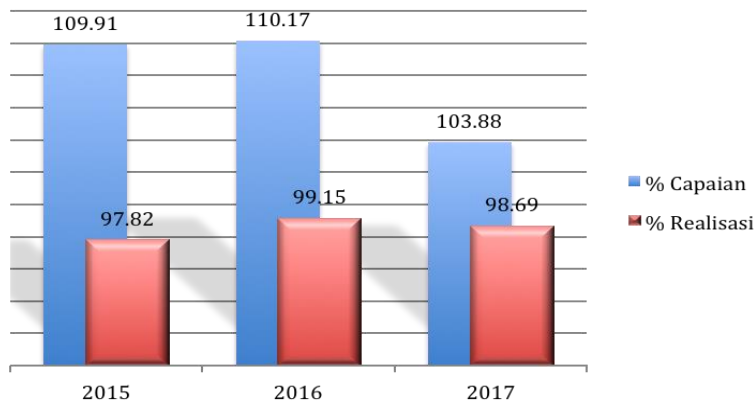
Masih terdapat 1 item sampel pengujian dengan metode GC (*Gas Chromatography*) yang belum dapat dirampungkan sampai dengan akhir Desember 2017 karena adanya kekosongan reagen (Gas Hidrogen) yang tidak tersedia di wilayah Sulawesi dan masih dalam tahap pemesanan.

Gambar 3.6  
Perbandingan Hasil  
sampling dan Pengujian  
kosmetik tahun 2017



Dibandingkan dengan capaian terhadap indikator yang sama pada tahun 2016 (110,17%), nilai capaian ini mengalami penurunan sebesar 6,29% sebagai pengaruh dari dilakukannya reviu Renstra di tahun 2017. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi kinerja terhadap pengujian kosmetik tahun 2016, terjadi penurunan sebesar 0,46% yang menunjukkan terjadi peningkatan jumlah produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat selama tahun 2017 di Provinsi Sulawesi Selatan.

Namun terhadap target 2019, nilai realisasi ini telah melampaui target yang ditetapkan. Akan dilakukan penyesuaian terhadap pola sampling untuk memastikan bahwa sampling telah dilakukan secara menyeluruh di wilayah Sulawesi Selatan.



Gambar 3.7  
Perbandingan Persentase  
Capaian dan Realisasi  
Kosmetik yang  
Memenuhi Syarat tahun  
2015, 2016, dan 2017

Nilai realisasi indikator kinerja ini lebih tinggi dibandingkan nilai realisasi untuk indikator yang sama di Balai Besar POM di Surabaya yaitu sebesar 87,18%. Banyaknya industri kosmetik yang menyebabkan jumlah dan jenis sebaran produk kosmetik lebih bervariasi di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Surabaya memperbesar peluang ditemukannya produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat dibandingkan Balai Besar POM di Makassar. Pada tahun 2017, jumlah industri kosmetik dalam cakupan wilayah pengawasan Balai Besar POM di Makassar adalah sebanyak 2 (dua) sarana sedangkan di Balai Besar POM di Surabaya adalah sebanyak 108 sarana industri kosmetik.

Capaian persentase kosmetik yang memenuhi syarat di tahun 2017 sebesar 103,88%. Meskipun BBPOM di Makassar sudah berhasil mencapai target persentase kosmetik yang memenuhi syarat, namun untuk menurunkan angka kosmetik yang tidak memenuhi syarat diperlukan upaya-upaya sebagai berikut :

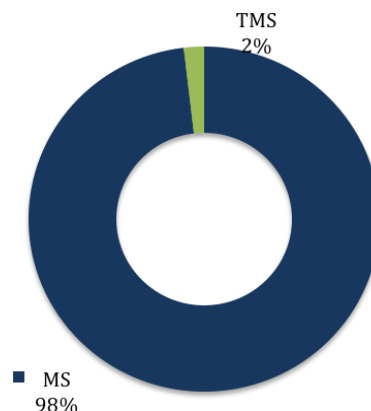
- ❖ Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan kosmetik yang memenuhi standar, karena masyarakat cenderung menggunakan kosmetik dengan hasil yang instan untuk sediaan perawatan kulit (mencerahkan, mengencangkan, menghaluskan), warna yang mencolok pada sediaan rias wajah (pewarna dilarang), kosmetik tanpa izin edar (illegal) baik impor maupun lokal.
- ❖ Pengawasan terhadap sarana produksi kosmetik yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan penerapan CPKB (Cara Produksi Kosmetik yang Baik) semakin baik, sehingga meningkatkan jumlah kosmetik yang memenuhi standar
- ❖ Pengawasan terhadap pelaku usaha kosmetik baik produsen maupun distributor masih perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan agar kosmetik yang beredar di masyarakat memenuhi syarat mutu dan keamanan.
- ❖ Penerapan sanksi (proses projustitia maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana produksi maupun distribusi yang melakukan pelanggaran antara lain memproduksi kosmetik mengandung bahan berbahaya, menjual kosmetik

tanpa ijin edar, menjual kosmetik yang sudah ditarik dari peredaran karena Public Warning.

- ❖ Penyebaran informasi melalui penyuluhan, leaflet, brosur, pameran, talk show, media masa baik cetak maupun elektronik terhadap penggunaan kosmetik yang aman dan bermutu kepada masyarakat.
- ❖ Penyebaran Informasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang adanya public warning produk kosmetik yang diterbitkan oleh Badan POM.
- ❖ Melakukan Operasi Gabungan Daerah maupun Nasional dengan Kepolisian.
- ❖ Melakukan Operasi Terpadu dengan Pusat Penyidikan Badan POM RI khusus untuk komoditi kosmetik.

#### 5. *Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat*

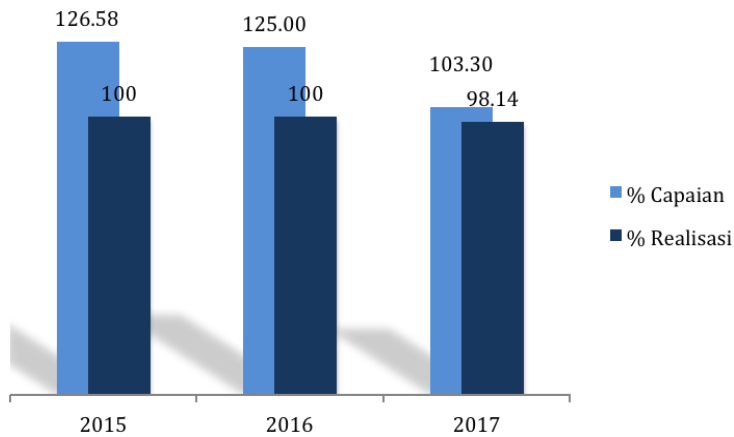
Realisasi persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat berdasarkan hasil pengujian laboratorium Balai Besar POM di Makassar tahun 2017 adalah sebesar 98,14%, dengan nilai capaian sebesar 103,30%. Pengukuran indikator ini dilakukan berdasarkan perbandingan jumlah produk Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat (211 sampel) terhadap jumlah seluruh produk Suplemen Kesehatan yang diuji berdasarkan parameter kritis (215 sampel) di Laboratorium pengujian Balai Besar POM di Makassar. Namun terhadap target 2019, nilai capaian ini telah melampaui target yang ditetapkan (89,30%)..



Gambar 3.8  
Hasil Pengujian Sampel Suplemen  
Kesehatan Tahun 2017

Nilai realisasi indikator kinerja ini sebanding dengan nilai realisasi di Balai Besar POM di Surabaya. Hal ini menunjukkan adanya kemiripan profil sebaran produk Suplemen Kesehatan di cakupan wilayah pengawasan Balai Besar POM di Makassar dan Balai Besar POM di Surabaya.

Capaian persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2017 sebesar 103,30% dan realisasi Suplemen Makanan yang memenuhi syarat sebesar 98,14% dari target 95%.

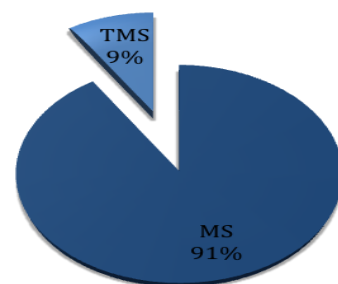


Gambar 3.9 Perbandingan Persentase Capaian dan Realisasi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat Tahun 2015, 2016, 2017

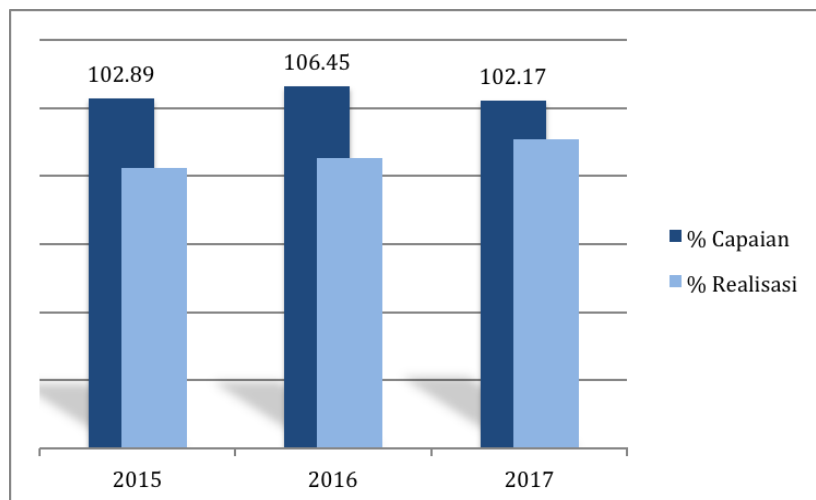
Laboratorium harus senantiasa meningkatkan kemampuan uji, baik dari segi sumber daya manusia, metode, alat, dan baku perbandingan. Di samping itu, suatu kajian mendalam tentang penentuan parameter kritis berbasis resiko dan perluasan katagori sampling suplemen kesehatan perlu dilakukan dalam rangka reuiu indikator kinerja ini.

## 6. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Realisasi persentase Makanan yang Memenuhi Syarat berdasarkan hasil pengujian laboratorium Balai Besar POM di Makassar tahun 2017 adalah sebesar 90,93%, dengan nilai capaian sebesar 102,17%. Pengukuran indikator ini dilakukan berdasarkan perbandingan jumlah produk Makanan yang memenuhi syarat (1173 sampel) terhadap jumlah seluruh produk makanan yang diuji berdasarkan parameter kritis (1290 sampel) di laboratorium pengujian Balai Besar POM di Makassar.



Dibandingkan dengan capaian terhadap indikator yang sama pada tahun 2016 (106,45%), nilai capaian ini mengalami penurunan sebesar 5,38%. Penurunan nilai capaian ini merupakan dampak dari dilakukannya reuiu Renstra dan revisi perjanjian kinerja tahun 2017 dengan melakukan penyesuaian terhadap realisasi tahun 2016.



Gambar 3.10 Perbandingan Persentase Capaian dan Realisasi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat Tahun 2015, 2016, 2017

Namun terhadap target 2019, nilai capaian ini telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena penetapan proporsi jumlah sampel rutin pada Pedoman Sampling 2017 sangat jauh lebih besar (64%) dibandingkan kategori lain. Sedangkan dari hasil evaluasi dan monitoring di lapangan, jenis sampel yang masuk dalam kategori sampel rutin dari hasil pengujiannya sebagian besar telah memenuhi syarat. Hal tersebut yang menyebabkan tingginya persentase capaian produk makanan yang memenuhi syarat (MS) sehingga realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan.

Realisasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan realisasi terhadap indikator yang sama di Balai Besar POM di Surabaya (83,70%). Jumlah sarana produksi pangan (MD) yang ada di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Makassar lebih sedikit dibandingkan jumlah sarana produksi pangan (MD) di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Surabaya. Hal ini memperkecil peluang jumlah temuan produk makanan yang tidak memenuhi syarat.

Capaian persentase makanan yang memenuhi standar tahun 2017 sebesar 102,17% dengan realisasi 90,93% dari target 89 % produk makanan yang memenuhi syarat dengan kriteria capaian MEMUASKAN. Beberapa hal yang telah dilakukan untuk mencapai target indikator ini adalah :

- ❖ Penyebaran informasi yang intensif melalui penyuluhan, leaflet, brosur, pameran, talk show, media masa baik cetak maupun elektronik oleh Balai Besar POM di Makassar kepada masyarakat terhadap makanan yang bermutu dan aman dikonsumsi.
- ❖ Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap mutu produk makanan termasuk PJAS (Pangan Jajanan Anak Sekolah) yang beredar sudah cukup baik akan mendorong pelaku usaha/produsen makanan untuk menghasilkan produk yang memenuhi standar.

- ❖ Intervensi pemenuhan persyaratan pengawasan pre market dan post market terhadap sarana produksi pangan dengan registrasi MD berakibat pada meningkatnya tingkat kepatuhan produsen dalam memenuhi persyaratan CPPB (Cara Produksi Pangan yang Baik), sehingga mutu pangan yang dihasilkan meningkat.
- ❖ Penerapan sanksi administrasi maupun projustitia pada sarana produksi dan distribusi yang melakukan pelanggaran di bidang makanan.

SS1 : Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan				
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Sampling dan Pengujian terhadap Produk Obat dan Makanan yang Beredar	Jumlah sampel obat yang diuji menggunakan parameter kritis	3010 sampel	2775 sampel	92,19
	Jumlah sampel makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	1290 sampel	1290 sampel	100
	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100%	100%	100
Meningkatnya Kualitas Sarana Produksi yang Memenuhi Standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	14,67%	19,39%	132
Meningkatnya Kualitas Sarana Distribusi yang Memenuhi Standar	Presentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	31,38%	40,24%	128,2
Meningkatnya Hasil Tindak Lanjut Penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	14 perkara	14 perkara	100

Tabel 3.2  
Realisasi dan Capaian Indikator Kegiatan Sasaran Strategis 1

*Sasaran Kegiatan 1: Meningkatkan Kualitas Sampling dan Pengujian terhadap Produk Obat dan Makanan yang Beredar*

Pengukuran terhadap Sasaran Kegiatan ini dilakukan menggunakan 3 indikator kinerja, yaitu jumlah sampel obat KB yang diuji menggunakan parameter kritis, jumlah sampel obat yang diuji menggunakan parameter kritis, dan pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK).

## 1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis

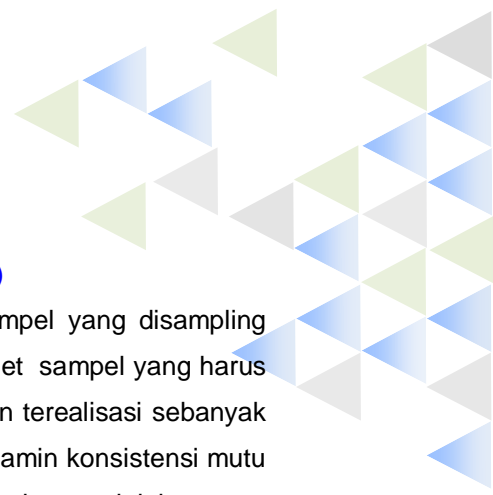
Target sampel pada tahun 2017 adalah 4300 sampel, dan terealisasi sebanyak 4065 sampel atau 94,53 %. Realisasi sampling ini tidak mencapai target dimana masih terdapat 225 sampel yang tidak dapat disampling karena karena anggaran pembelian sampel yang tidak mencukupi. Pola sampling dan penentuan lokasi pembelian sampel masih perlu dievaluasi untuk memastikan sampel tidak hanya disampling di distributor kosmetik resmi tetapi menyebar sampai ke pasar-pasar tradisional. Sampel diuji menggunakan parameter kritis yaitu parameter uji yang bersifat sebagai penentu terhadap jaminan keamanan, manfaat dan mutu produk yang diuji. Parameter kritis ini ditetapkan dalam pedoman sampling Obat dan Makanan.

Beberapa kendala yang terjadi selama proses pengujian di laboratorium, diantaranya :

- ❖ Terjadinya kerusakan permanen pada peralatan utama di Laboratorium Pengujian Kosmetik dan Makanan selama proses pengujian tahun 2017 yang menyebabkan terjadinya *overload* pengujian. Tindak lanjut telah dilakukan dengan mengalokasikan anggaran untuk pembelian alat baru pada tahun anggaran 2018.
- ❖ Pola mutasi yang terjadi pada awal tahun 2017 menyebabkan berkurangnya personel penguji yang berdampak pada meningkatnya beban kerja pengujian di laboratorium.
- ❖ Pelaksanaan kegiatan sampling untuk komoditi kosmetik tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan karena dilakukannya revisi terhadap perencanaan yang telah dibuat di awal tahun setelah diberlakukannya Pedoman Sampling Tahun 2017 pada pertengahan tahun berjalan. Sehingga target sampling yang tidak dapat dicapai pada awal tahun, baru dapat terpenuhi di akhir tahun. Hal ini mengakibatkan penumpukan jumlah sampel pada akhir tahun yang melebihi kapasitas pengujian.
- ❖ Sebagai salah satu balai yang ditunjuk menjadi Laboratorium Rujukan (Disolusi dan Bahan Tambahan Pangan) dan Laboratorium Unggulan (Biomolekuler), terdapat penambahan beban sampel yang harus diuji di Balai Besar POM di Makassar.

Jenis Sampel	Sampling		Hasil Uji	
	Target	Realisasi	MS	TMS
Obat KB	52	54	54	0
Obat	737	728	713	14
Narkotika, Psikotropika, Prekursor	69	69	68	0
Obat Tradisional	645	645	583	62
Kosmetik	1292	1067	1053	13
Suplemen Makanan	215	215	211	4
Makanan :	1290	1290	1173	117
<b>Jumlah</b>	<b>4300</b>	<b>4078</b>	<b>3855</b>	<b>210</b>

Tabel 3.3  
Realisasi Sampling dan  
Pengujian Tahun 2017



## 2. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)

Indikator Kinerja kegiatan ini diukur berdasarkan jumlah sampel yang disampling pada Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) dibandingkan dengan target sampel yang harus di sampling di IFK. Target dari indikator ini adalah 729 sampel dan terealisasi sebanyak 729 sampel atau sebesar 100%. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin konsistensi mutu obat, khususnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui sarana pelayanan kesehatan pemerintah di Sulawesi Selatan.

Realisasi sampling obat di sektor publik sangat tergantung dengan stok obat pada saat dikunjungi oleh petugas, sehingga seringkali tidak sesuai dengan perencanaan baik dari segi jumlah, jenis, maupun waktu pelaksanaannya.

Pemetaan IFK dilakukan di seluruh kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah 24 kabupaten/kota dengan rata-rata ketersediaan obat yang terdapat di sarana adalah 90%.

Perencanaan sampling obat di sektor publik umumnya dilakukan untuk sampel obat kategori A dan Kategori B. Produk obat kategori A adalah obat yang tercantum dalam Formularium Nasional, meliputi Obat dan Vaksin, sedangkan Produk Obat Kategori B adalah obat yang digunakan untuk pengobatan infeksi yang spesifik maupun parasitik meliputi obat golongan antibiotik, antiretroviral, antimalarial, antituberkulosis, anthelmintik/antiparasit, dan antifungi. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk menyampling kategori lain bilamana ditemukan di IFK tersebut.

Pada dasarnya pemerintah daerah dalam hal ini dinas kesehatan telah mendapatkan arahan dari kementerian kesehatan untuk membantu petugas dari Balai Besar POM di Makassar pada saat melakukan sampling di IFK.

## 3. Persentase cakupan sarana produksi Obat dan Makanan

Cakupan pengawasan sarana produksi pertahun dihitung dari jumlah sarana produksi yang diperiksa dibandingkan dengan target jumlah sarana produksi yang diperiksa yang ditetapkan berdasarkan kriteria Pedoman Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan. Target kegiatan ini sebanyak 115 sarana produksi obat dan makanan (14,67%) dengan realisasi sebesar 152 sarana produksi obat dan makanan (19,39%) dari 784 sarana produksi yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana terlihat pada tabel 3.5 dibawah ini. Sehingga capaian dari kegiatan ini sebesar 132 %.

Jumlah sarana produksi obat dan makanan yang ada di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Makassar masih terbatas pada sarana produksi pangan, obat tradisional dan kosmetik. Nilai capaian dari indikator kegiatan ini disebabkan adanya gap yang

cukup jauh dalam penetapan target terhadap keseluruhan jumlah sarana produksi yang terdapat di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Makassar.

Ada beberapa sarana produksi yang berada di kabupaten dengan kondisi geografis masih sulit dijangkau karena jarak tempuh yang jauh dan belum memadainya sarana transportasi, menyebabkan terkendalanya proses pengawasan pada sarana tersebut.

Perencanaan pengawasan sarana produksi obat dan makanan yang dilakukan di Balai Besar POM di Makassar berdasarkan analisis resiko pengawasan dua tahun terakhir (2014-2015), dan sarana produksi yang belum pernah diperiksa sebelumnya oleh petugas dari Balai Besar POM di Makassar

Pemenuhan capaian ini juga didukung oleh kompetensi SDM yang memadai serta koordinasi yang telah terjalin baik dengan pemerintah daerah setempat.

Sebagai rencana tindak lanjut untuk mengantisipasi hal tersebut, akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pemutakhiran data sarana produksi obat dan makanan yang terdapat di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Makassar berbasis teknologi informasi.
2. Penetapan target dilakukan berdasarkan pada jumlah seluruh sarana produksi obat dan makanan yang terdapat di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Makassar.

Pertumbuhan sarana produksi makanan di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Makassar berkembang dengan sangat pesat, sehingga realisasi melampaui target yang telah ditetapkan di awal tahun.

Dengan adanya reuiu Renstra dan revisi perjanjian kinerja tahun 2017, Realisasi tahun 2017 untuk indikator cakupan pengawasan sarana produksi ini masih relevan dengan target akhir periode Renstra 2015-2019 yaitu sebesar 19%, sehingga kinerja pengawasan sarana produksi obat makanan dapat terus ditingkatkan.

Nama Sarana	Target	Realisasi
<b>Obat Tradisional :</b>		
IOT	2	2
UKOT	2	14
UMOT	22	14
<b>Kosmetik</b>		
MD	58	63
PIRT	27	41
Industri Miras	-	1
Fortifikasi Garam	2	7

#### 4. Persentase cakupan sarana distribusi Obat dan Makanan

Jumlah sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin yang ditetapkan berdasarkan kriteria Pedoman Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan serta Pedoman Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya. Target dari indikator kegiatan ini adalah 1545 sarana (31,38%) dengan realisasi 1979 sarana (40,20%) dari 4923 sarana yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Capaian dari kegiatan ini sebesar 128,23%. Pengawasan yang dilakukan terhadap sarana distribusi adalah sebagai berikut :

- ❖ Sarana distribusi Obat dan NAPZA sebanyak 921 sarana
- ❖ Sarana distribusi Obat Tradisional sebanyak 225 sarana
- ❖ Sarana distribusi kosmetik sebanyak 309 sarana
- ❖ Sarana distribusi Suplemen Kesehatan sebanyak 73 sarana
- ❖ Sarana distribusi Pangan dan Bahan Berbahaya sebanyak 279 sarana
- ❖ Sarana distribusi dalam rangka intensifikasi khusus sebanyak 172 sarana

Jumlah SDM yang terbatas dan jarak tempuh yang hanya dapat dijangkau dengan transportasi darat yang membutuhkan waktu tempuh cukup lama (misalnya, kabupaten Luwu Timur yang ditempuh dengan 16 jam perjalanan), mengakibatkan pengawasan terhadap sarana distribusi obat dan makanan belum mampu menjangkau sarana distribusi obat dan makanan yang lokasinya jauh dari ibukota kabupaten.

Pada dasarnya pemerintah daerah dalam hal ini dinas kesehatan telah membantu petugas dari Balai Besar POM di Makassar pada saat melakukan pemeriksaan sarana di daerahnya.

#### 5. Jumlah Perkara di bidang Obat dan Makanan

Pengukuran terhadap indikator kegiatan ini adalah berdasarkan pada jumlah kasus yang ditindaklanjuti secara *pro justitia* berdasarkan hasil gelar kasus. Jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDPnya kepada kejaksaan melalui Korwas PPNS. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana di bidang obat dan makanan tahun 2017 untuk pelanggaran dengan tindak lanjut Pro Justitia sebanyak 14 perkara dari target tahun 2017 sebanyak 14 perkara sehingga capaian dari indikator kegiatan ini adalah sebesar 100 %.

Tabel 3.4  
Realisasi Indikator Kegiatan  
Jumlah Perkara di Bidang  
Obat dan Makanan di Balai  
Besar POM di Makassar  
Tahun 2017

No.	Produk	Jumlah Kasus	Tindak Lanjut	
			Non SPDP	Projusticia
1	Obat	5	2	3
2	Obat Tradisional	3	2	1
3	Kosmetika	17	8	9
4	Suplemen Kesehatan	0	0	0
5	Makanan	5	4	1
Total		30	16	14

Tercapainya realisasi untuk indikator kegiatan ini didukung oleh beberapa factor, antara lain :

1. Kooperatifnya informan yang memberikan keterangan terhadap adanya tindak pidana di bidang kesehatan dan di bidang pangan.
2. Kerjasama yang baik dengan lintas sektor terutama korwas PPNS/polisi. Kerjasama yang dilakukan antara lain Operasi Gabungan Daerah (OPGABDA), Operasi STROM (perkuatan pengawasan obat dan makanan illegal), Operasi Gabungan Nasional (OPGABNAS), dan Operasi Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal.

Untuk lebih meningkatkan kualitas capaian indikator ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- ❖ Kualitas dan kuantitas SDM terkait penyidikan obat dan makanan
  - A. Kualitas jumlah personil di penyidikan dianggap masih kurang, karena petugas yang melakukan investigasi awal, itu juga yang melakukan penindakan dan penyidikan.
  - B. Kuantitas SDM sudah memenuhi atau memadai karena sudah melakukan penyidikan dan pelatihan terkait investigasi awal maupun penyidikan (sudah mengikuti PPNS)
- ❖ Meningkatkan koordinasi dengan *Criminal Justice System* di daerah.
- ❖ Perlunya penambahan fasilitas transportasi,perlengkapan, dan penunjang pelaksanaan investigasi oleh petugas.  
Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan/mempertahankan capaian terhadap Indikator kegiatan ini antara lain :
- ❖ Meningkatkan kompetensi PPNS, personel penyidikan dengan mengikuti pelatihan atau workshop, pertemuan investigasi awal dan proses penyidikan.
- ❖ Meningkatkan koordinasi PPNS Badan POM RI, apa kekurangan dan kelebihan masing-masing balai untuk sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan dalam investigasi awal, maupun dalam proses pendidikan.

**Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan**

Sasaran Strategis ini mempunyai 2 indikator kinerja yaitu Tingkat Kepuasan Masyarakat (merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama) dan Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan.

SS2 Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Tingkat Kepuasan Masyarakat	80,00	87,07	108,84	Memuaskan
Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	4	4	100	

Tabel 3.5  
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

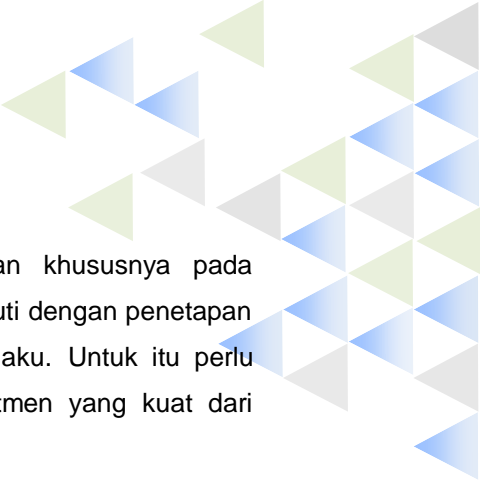
### 1. Tingkat Kepuasan Masyarakat

Tingkat Kepuasan Masyarakat adalah tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diperoleh dari survei kepuasan masyarakat yang mengacu pada pedoman PERMENPAN No. 16 tahun 2004 tentang tata cara pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat. Realisasi Tingkat Kepuasan Masyarakat dapat dilihat dari hasil penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat di *catchment area* Balai Besar POM di Makassar sebesar 88,60 dari target nilai IKM sebesar 80 dengan jumlah responden sebanyak 356 responden dengan mayoritas merupakan pelanggan yang memanfaatkan layanan di ULPK.

Adapun unsur-unsur dalam survei kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut:

Prosedur Pelayanan	Keadilan Mendapatkan Pelayanan
Persyaratan Pelayanan	Kesopanan dan Keramahtamahan Petugas
Kejelasan Petugas Pelayanan	Kewajaran Biaya Pelayanan
Kedisiplinan Petugas Pelayanan	Kepastian Biaya Pelayanan )*
Tanggung Jawab Petugas Pelayanan	Kepastian Jadwal Pelayanan
Kemampuan Petugas Pelayanan	Kenyamanan Lingkungan
Kecepatan Pelayanan	Keamanan Pelayanan

\*) Unsur ini hanya terdapat dalam form kuesioner untuk pelanggan pihak ketiga layanan pengujian



Permintaan masyarakat terkait ketepatan waktu pelayanan khususnya pada pelaksanaan pengujian sampel pihak ketiga akan terus ditindaklanjuti dengan penetapan batas waktu minimal pengujian berdasarkan peraturan yang berlaku. Untuk itu perlu adanya upaya peningkatan berkesinambungan antara lain komitmen yang kuat dari organisasi dan personil dalam memahami kebutuhan masyarakat.

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Balai Besar POM di Makassar senantiasa meningkatkan kualitas sarana dan prasarana layanan publik.
2. Balai Besar POM di Makassar senantiasa meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia terkait layanan publik dengan mengikuti pelatihan pelayanan prima secara berkesinambungan.
3. Komitmen penguji laboratorium untuk lebih memprioritaskan penyelesaian pengujian sampel pihak ketiga daripada sampel rutin.

Dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu sebesar 80, realisasi tahun 2017 untuk indikator tingkat kepuasan masyarakat ini telah melampaui target sehingga perlu dilakukan beberapa opsi, diantaranya melalui penyesuaian target Renstra, perbaikan metode pengukuran tingkat kepuasan masyarakat yang lebih objektif, dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat ini seyogyanya dilakukan oleh pihak ketiga yang independen.

Di tahun 2017, BBPOM di Makassar memperoleh Piagam Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan kategori “Baik”.

## **2. Jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan**

Jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan adalah keterikatan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan secara mandiri dan atau terpadu melalui pengawasan, advokasi pembentukan tim terpadu, pertemuan dan kegiatan lainnya yang dapat memperkuat pengawasan dengan menggunakan anggaran daerah baik berupa APBD Kabupaten/Kota dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat, yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Target dari indikator kinerja

ini adalah 4 Kabupaten/Kota dan terealisasi sebanyak 4 kabupaten/kota (100 %). Adapun keempat Kabupaten/Kota tersebut adalah:

1. Kabupaten Luwu Timur (Rp. 35.000.000,-)
2. Kabupaten Jeneponto (Rp. 15.000.000,-)
3. Kabupaten Wajo (Rp. 20.824.000,-), dan
4. Kabupaten Luwu Utara (Rp. 35.000.000,-)

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pemenuhan indikator kinerja ini meliputi penyebaran informasi dan penyuluhan keamanan pangan. Pendekatan yang lebih intensif terhadap Kabupaten/Kota yang telah memberikan komitmen tersebut perlu tetap dilakukan agar pengalokasian anggaran pelaksanaan pengawasan regulasi Obat dan Makanan tersebut tetap dipertahankan. Demikian pula terhadap Kabupaten/Kota yang belum memberikan komitmen, perlu dilakukan pendekatan yang intensif agar dapat mengalokasikan anggarannya untuk Pengawasan Obat dan Makanan.

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2017			TARGET TAHUN 2019		
	Target 2017	Realisasi 2017	% Capaian	Target 2019	Realisasi 2017	% Capaian
Tingkat Kepuasan Masyarakat	80,00	87,07	108,84	84	87,07	103,65
Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	4	4	100	6	4	66,66
<b>Rata-rata</b>			<b>104,42</b>			<b>88,16</b>

Tabel 3.6  
Perbandingan realisasi Sasaran Strategis 2 terhadap target 2019

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja dengan dua indikator kinerja pada tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir periode renstra tahun 2019 diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar 88,16%. Capaian ini telah melampaui target capaian tahun 2019 sehingga perlu dipertimbangkan untuk melakukan reuiu dalam rangka meninjau kembali besaran target tingkat kepuasan pelanggan yang telah terlampaui, atau dengan menyempurnakan metode survei terkait.

Pencapaian Sasaran Strategis ke-2 ditunjang oleh kegiatan Meningkatkan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan indikator jumlah layanan publik dan jumlah komunitas yang diberdayakan.

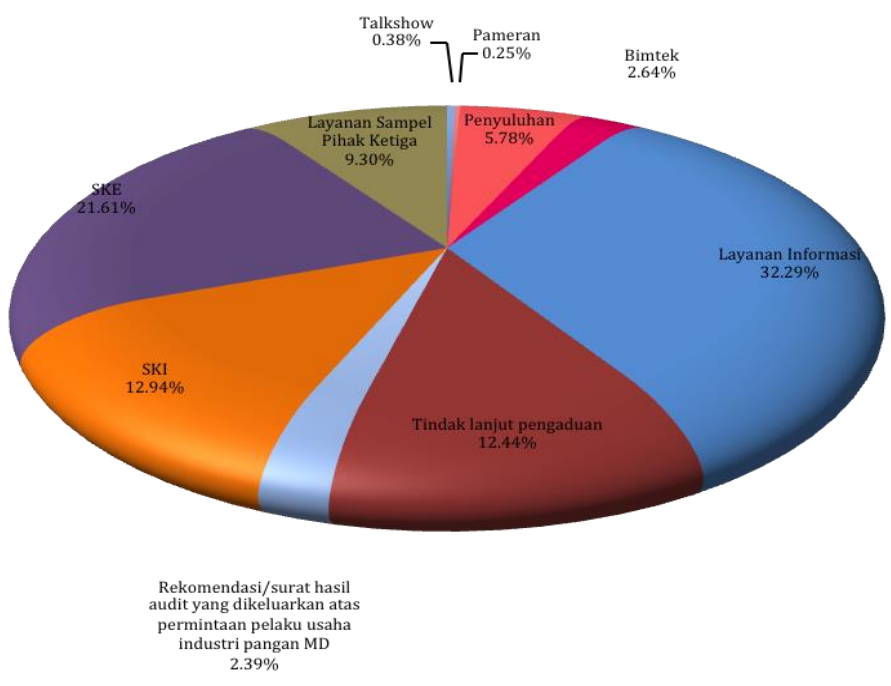


Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat			
Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah layanan publik	746	794	106,43%
Jumlah komunitas yang diberdayakan	23	24	104,00%

Tabel 3.7  
Realisasi Indikator Kegiatan Sasaran Strategis 2

a) Layanan Publik

Layanan publik BBPOM di Makassar berupa layanan informasi dan layanan sertifikasi. Layanan informasi diukur berdasarkan jenis dan frekuensi layanan informasi dan tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh BBPOM di Makassar baik penyuluhan langsung atau melalui media cetak/elektronik. Sedangkan layanan sertifikasi dihitung dari jumlah rekomendasi/surat hasil audit yang dikeluarkan atas permintaan pelaku usaha



industri Pangan MD; audit sertifikasi dalam rangka rekomendasi halal; pemenuhan pendirian PBF, IKOT, UMOT, Kosmetik; Laporan Hasil Pengujian Pihak Ketiga dan SKI/SKE yang diterbitkan.

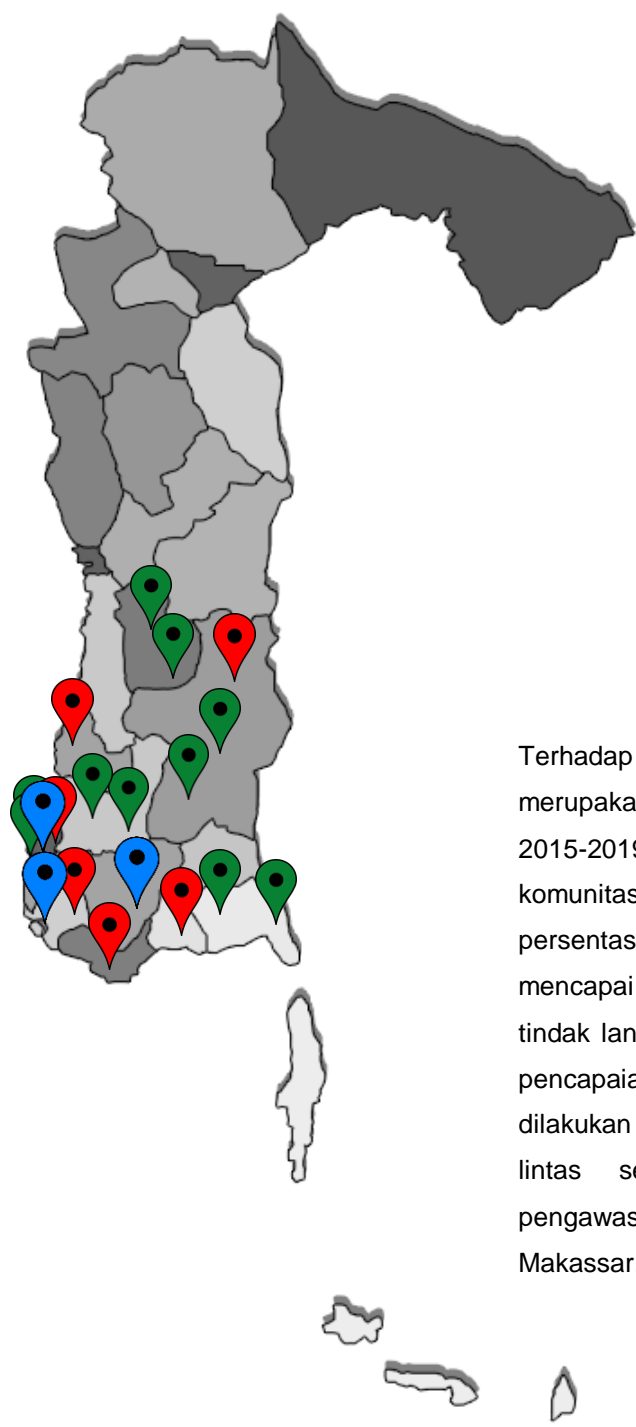
Target dari layanan ini adalah 746 layanan dan terealisasi sebanyak 794 layanan (106,43%). Adapun Layanan publik yang dilakukan oleh BBPOM di Makassar adalah penerbitan SKI/SKE, Pelayanan ULPK, Penyuluhan Keamanan Pangan, Penyebaran

Informasi melalui Talkshow, Pameran, Penyuluhan, Bimtek (Piagam Bintang keamanan pangan/kantin sekolah, Bimtek keamanan pangan dan mutu PJAS, Bimtek petugas pengelola pasar, Bimtek Piagam bintang Keamanan pangan), Pencetakan Leaflet, Layanan Informasi, Tindak Lanjut Pengaduan, Toksivigilance, SIKER, Operasional Mobil Laboratorium, Audit Surveilens, Peningkatan Kompetensi, Audit Sarana dan pengujian pihak ketiga.

b) Komunitas yang diberdayakan

Komunitas yang diberdayakan adalah gabungan dari kelompok orang di desa/kelurahan/pasar yang diberdayakan. Target kegiatan ini adalah 23 komunitas, dan terealisasi 104% (24 komunitas). Adapun komunitas yang diberdayakan tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Nama Komunitas	Lokasi
1.	Kelurahan Sambung Jawa	Kota Makassar
2.	Desa Banggae	Kabupaten Takalar
3.	Desa Tope Jawa	Kaputaten Takalar
4.	Kelurahan Cambayya	Kota Makassar
5.	Desa Marioraja	Kabupaten Soppeng
6.	Desa Gattareng Toa	Kabupaten Soppeng
7.	Kelurahan Tammua	Kota Makassar
8.	Desa Watu	Kabupaten Bone
9.	Desa Parippung	Kabupaten Bone
10.	Kelurahan Kunjung Mae	Kota Makassar
11.	Kelurahan Loka	Kabupaten Bulukumba
12.	Kelurahan Caile	Kabupaten Bulukumba
13.	Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar	Kota Makassar
14.	Pasar Pattalassang	Kabupaten Takalar
15.	Pasar Karisa	Kabupaten Jeneponto
16.	Pasar Sentral Kabupaten Bantaeng	Kabupaten Bantaeng
17.	Pasar Erasa	Kabupaten Pangkep
18.	Pasar Awangpone	Kabupaten Bone
19.	Komunitas sekolah di Kota Makassar (2014)	Kota Makassar
20.	Komunitas sekolah di Kota Makassar (2015)	Kota Makassar
21.	Komunitas Sekolah di Kabupaten Takalar (2016)	Kabupaten Takalar
22.	Komunitas Sekolah di Kabupaten Gowa (2017)	Kabupaten Gowa
23.	Komunitas Penyuluh Keamanan Pangan PIRT	
24.	Komunitas PKP Garam Fortifikasi Daerah	



Keterangan :

-  Komunitas Pasar
-  Desa/Kelurahan
-  Sekolah

Terhadap target tahun 2019 yang merupakan akhir periode Renstra 2015-2019 yaitu sebanyak 24 komunitas sarana yang diberdayakan, persentase capaian indikator ini telah mencapai 95,83%. Sebagai rencana tindak lanjut untuk lebih meningkatkan pencapaian indikator ini, akan dilakukan perkuatan advokasi kepada lintas sektor terkait di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Makassar.

### Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Badan POM

#### SS.3 Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM

Tabel 3.8

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Nilai SAKIP Balai Besar POM di Makassar oleh Badan POM	80 (A)	70,27 (BB)	87,84	Cukup

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kapasitas BPOM

Pengukuran terhadap Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Badan POM dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja Nilai SAKIP Balai Besar POM di Makassar dari Badan POM, dengan kategori hasil penilaian SAKIP sebagai berikut:

Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
> 90	AA	Sangat memuaskan
> 80 s.d. 90	A	Memuaskan
> 70 s.d. 80	BB	Sangat baik
> 60 s.d. 70	B	Baik
> 50 s.d. 60	CC	Cukup baik
> 30 s.d. 50	C	Agak kurang
< 30	D	Kurang

Tabel 3.9  
Kriteria Penilaian SAKIP

Nilai SAKIP Balai Besar POM di Makassar Tahun 2016 dari Badan POM terealisasi dengan nilai 70,27 (BB) atau berkategori “sangat baik”. Nilai realisasi ini meningkat dibandingkan penilaian pada tahun 2015 yaitu 69,4 (B) dengan persentase capaian terhadap target nilai SAKIP Balai Besar POM di Makassar tahun 2017 (A) yaitu sebesar 86,84% (Kategori CUKUP)

Pencapaian indikator kinerja ini masih perlu ditingkatkan sejalan dengan target yang telah ditetapkan di akhir periode Renstra Balai Besar POM di Makassar Tahun 2015-2019.

Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2019
57,20 (CC)	69,41 (B)	70,27	80 (A)

Tabel 3.10  
Perbandingan realisasi Nilai SAKIP Balai Besar POM di Makassar Tahun 2016 terhadap realisasi tahun 2015 dan target 2019

Dibandingkan dengan pencapaian yang diperoleh Balai Besar POM di Surabaya yaitu sebesar 91,26%, Balai Besar POM di Makassar akan terus melakukan perbaikan dan meminimalisir faktor-faktor yang dapat menimbulkan pengaruh negatif dalam penerapan SAKIP di Balai Besar POM di Makassar, sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap penerapan SAKIP Badan POM.

Upaya-upaya yang terus dilakukan oleh Balai Besar POM di Makassar untuk pencapaian indikator kinerja ini diantaranya :

1. Meningkatkan komitmen pimpinan dan seluruh staf Balai Besar POM di Makassar terhadap implementasi SAKIP di lingkungan Balai Besar POM di Makassar;
2. Mendorong peningkatan manajemen dan akuntabilitas kinerja Balai Besar POM di Makassar melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan setiap bulan sehingga setiap kendala maupun pencapaian yang diperoleh dapat segera ditindaklanjuti untuk mendukung pencapaian kinerja Balai Besar POM di Makassar.
3. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-Performance sebagai salah satu aplikasi yang telah dikembangkan oleh Badan POM yang merupakan sistem pengelolaan kinerja secara elektronik berbasis Balance Scorecard (BSC).
4. Meningkatkan kepedulian dan melakukan penyegaran secara berkala terkait pemahaman maupun implementasi akuntabilitas kinerja dan Reformasi Birokrasi kepada seluruh komponen di Balai Besar POM di Makassar.

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang target sasaran strategis 3 ini adalah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan dan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu, sudah terlaksana rata-rata 91,86%.

SS3 : Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Badan POM				
Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Presentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	84%	80,68%	96,05
Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	10	100

Tabel 3.11

Capaian Indikator Kegiatan Sasaran Strategis 3

1. Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan, dengan indikator presentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar. Indikator kegiatan ini adalah persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar.

Dalam rangka meningkatkan pencapaian terhadap indikator kinerja yang terkait pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium di tahun mendatang, Balai Besar POM di Makassar senantiasa melakukan penyesuaian terhadap standar minimum peralatan laboratorium yang dilengkapi dengan standar fisik bangunan laboratorium untuk mengakomodir bertambahnya parameter uji kritis yang wajib diujikan dari tahun ke tahun.

2. Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu, dengan indikator jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu.

Dokumen yang dihasilkan dari indikator kinerja kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2018
- 2) RKAKL/DIPA Tahun 2018
- 3) Laporan Kinerja Tahun 2016
- 4) Laporan Triwulan I Tahun 2017
- 5) Laporan Triwulan II Tahun 2017
- 6) Laporan Triwulan III Tahun 2017
- 7) Laporan Tahunan 2016
- 8) Laporan Keuangan Tahun 2016, dan
- 9) Laporan keuangan semester I Tahun 2017
- 10) Reviu Renstra 2015-2019

Dari hasil analisis ketiga sasaran strategis diatas, semua indikator pencapaiannya telah  $\geq 100$  %. Maka dilakukan pembobotan untuk masing-masing sasaran strategis dan

diperoleh Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) masing-masing Sasaran Strategis secara berurutan adalah 103,48%; 104,42% dan 87,84%. Pengukuran pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada Lampiran 6.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Pada awal tahun 2017, sesuai Surat Pengesahan DIPA No. SP DIPA - 063.01.2.432923/2016, jumlah anggaran yang diperoleh BBPOM di Makassar adalah sebesar Rp. 41.050.832.000,-. Berdasarkan data realisasi penyerapan anggaran per 31 Desember 2017, realisasi sebesar Rp 37.093.616.332,- atau 90,36%.

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan	8.672.436.000	7.414.113.863	85,49
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	4.320.991.000	3.970.986.698	91,90
3.	Meningkatnya kualitas, kapasitas kelembagaan BBPOM di Makassar	28.057.405.000	25.708.515.771	91,63
JUMLAH		41.050.832.000	37.093.616.332	90,36

Tabel 3.12 Sasaran Strategis dan Realisasi Anggarannya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
<b>Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan</b>					
1	Meningkatnya Kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	1 Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	5.305.293.000	4.693.724.805	88,47
		2 Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)			
2	Meningkatnya Kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	267.872.000	220.828.094	82,44
3	Meningkatnya Kualitas sarana	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan	1.533.416.000	1.493.684.030	97,41

	distribusi yang memenuhi standar	Makanan				
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	1.565.855.000	1.005.876.934	64,24	
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat						
5	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1	Jumlah layanan publik BB/BPOM	3.233.857.000	3.087.383.633	95,47
		2	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	1.087.134.000	883.603.065	81,28
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Makassar						
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	25.598.184.000	23.369.395.421	91,29	
7	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	2.459.221.000	2.339.120.350	95,12	

Tabel 3.13 Realisasi anggaran dari setiap indikator kegiatan tahun 2017

Faktor penyebab belum optimalnya realisasi anggaran antara lain karena rendahnya persentase capaian indikator kinerja Jumlah perkara di bidang obat dan makanan sebesar 63,54% dari Sasaran kegiatan Meningkatkan hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Obat dan Makanan, disebabkan karena komponen penganggaran untuk output ini mencakup secara keseluruhan sampai pada tahap pemanggilan saksi dan ahli dalam proses persidangan, sedangkan dalam definisi operasional perkara yang dihitung adalah hanya perkara yang telah diterbitkan SPDPnya kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS. Agar realisasi anggaran lebih optimal perlu dilakukan beberapa perbaikan sesuai yang direkomendasikan oleh Inspektorat Badan POM sebagai berikut :

1. Memaksimalkan manfaat monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala di semua level unit kerja Balai Besar POM di Makassar
2. Melakukan reviu terhadap kegiatan-kegiatan yang kurang memberikan daya ungkit terhadap pencapaian kinerja Balai Besar POM di Makassar.

### 3.3 Analisis Efisiensi Kegiatan

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika  $IE \geq SE$ , maka kegiatan dianggap efisien

Jika  $IE < SE$ , maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

INDIKATOR KEGIATAN	TE	KATEGORI
Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan	0,07	EFISIEN
Pengawasan Sarana Produksi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya	0,61	EFISIEN
Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya	0,32	EFISIEN
Penyidikan obat dan makanan	0,57	EFISIEN
Layanan Publik	0,09	EFISIEN
Jumlah komunitas yang diberdayakan	0,30	EFISIEN
Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai standar	0,06	EFISIEN
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	0,06	EFISIEN

Tabel 3.14 Nilai TE dan kategori efisiensi indikator kegiatan

Pada tahun 2017, dari 8 kegiatan utama yang mendukung pencapaian 3 sasaran strategis yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Makassar tidak ada kegiatan yang tidak efisien. Nilai TE yang diperoleh bervariasi antara 0,06 sampai 0,61. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Kegiatan Jumlah Komunitas yang diberdayakan mempunyai TE tertinggi karena efisiensi penggunaan anggaran jauh lebih kecil dibandingkan capaian output.

# PENUTUP

## 4

### 4.1 Kesimpulan

Balai Besar POM di Makassar sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Makassar kepada Badan POM RI, disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Balai Besar POM di Makassar juga merupakan upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.


Tahun 2017 merupakan tahun ketiga implementasi Rencana Strategis 2015 – 2019 dimana Balai Besar POM di Makassar telah menetapkan satu program utama yaitu Program pengawasan obat dan makanan. Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dapat dilaksanakan dengan baik. Dari 8 indikator kegiatan utama tidak menunjukkan nilai TE dibawah nilai nol, sehingga seluruh kegiatan tersebut dianggap efisien.

Berkaitan dengan pencapaian kinerja tersebut, Balai Besar POM di Makassar terus melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkesinambungan guna meningkatkan kinerja dan kompetensi pada masa mendatang. Sistem pengawasan obat dan makanan harus dibangun dengan kapabilitas yang tinggi dan jangkauan yang luas, sehingga diperlukan dukungan sumber daya dan dana yang tidak sedikit, serta sarana dan prasarana yang memadai.

### 4.2 Saran

Beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Balai Besar POM di Makassar antara lain:

1. Perkuatan Laboratorium, dilakukan baik dari segi jumlah dan kompetensi SDM, sarana dan prasarana, serta penerapan sistem jaminan mutu laboratorium secara konsisten.
2. Meningkatkan cakupan pengawasan dengan melibatkan lintas sektor terkait yang berada di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar.

- 
3. Peningkatan sistem pengawasan obat dan makanan baik untuk *premarket evaluation* maupun *postmarket control*.
  4. Optimalisasi sistem teknologi dan informasi sebagai sarana komunikasi sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkini terkait hasil pengawasan dan pelayanan publik di Balai Besar POM di Makassar
  5. Penerapan *cascading* pada setiap tahapan kegiatan mulai dari Sasaran Strategis Organisasi sampai level individu.
  6. Pola sampling disesuaikan dengan perencanaan tahunan dan bulanan.
  7. Optimalisasi advokasi dengan lintas sektor yang menghasilkan nota kesepahaman sesuai amanat Instruksi Presiden nomor  
Untuk beberapa sasaran yang belum dapat dicapai akan diupayakan untuk direncanakan dan dilaksanakan lebih baik dan optimal di masa datang.

# LAMPIRAN

### Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Makassar

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Baseline	Target						Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksanaan	K/L-N-B-NS- BS											
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019														
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	<b>SS 1</b> Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat	99.00	92.00	92.50	93.00	93.50	94.00	5.243	5.768	6.345	7.297	8.313														
				1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat	99.00	92.00	92.50	93.00								93.50	94.00										
				1.2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	86.00	80.00	81.00	82.00								83.00	84.00										
				1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	98.90	89.00	90.00	91.00								92.00	93.00										
				1.4. Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat	99.00	79.00	80.00	81.00								82.00	83.00										
				1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	77.40	80.00	80.00	81.00								81.00	82.00										
				<b>SS 2</b> Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan pembinaan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan	Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat	NA	65.00	65.00								70.00	75.00	80.00	1.850	1.870	1.930	2.000	2.120				
							2.1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	NA								65.00	65.00	70.00								75.00	80.00
							2.2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	NA								3.00	3.00	4.00								5.00	6.00
				<b>SS 3</b> Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat	B	B	A								A	A	A	25.431	27.974	30.772	34.154	37.920				
							3.1. Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM	B								B	A	A								A	
				<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>																							
				<b>SP 1</b> Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan																							
				1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat																							
				Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat																							
99.00																											
92.00																											
92.50																											
93.00																											
93.50																											
94.00																											
1.2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat																											
Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat																											
86.00																											
80.00																											
81.00																											
82.00																											
83.00																											
84.00																											
1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat																											
Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat																											
98.90																											
89.00																											
90.00																											
91.00																											
92.00																											
93.00																											
1.4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat																											
Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat																											
99.00																											
79.00																											
80.00																											
80.00																											
81.00																											
81.00																											
82.00																											
1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat																											
Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat																											
77.40																											
80.00																											
80.00																											
81.00																											
81.00																											
82.00																											



LAMPIRAN 2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR

NO.	SASARAN STRATEGIS/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>SASARAN STRATEGIS</b>			
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	95.00 %
		2 Persentase Produk Obat Tradisional Yang memenuhi	85.00 %
		3 Persentase Produk Kosmetik yang memenuhi syarat	95.00 %
		4 Persentase Produk Suplemen Kesehatan yang	95.00 %
		5 Persentase Produk Makanan yang memenuhi syarat	89.00 %
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	1 Tingkat Kepuasan Masyarakat	80.00 %
		2 Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	4.00 Kab/Kota
3	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan	Nilai SAKIP BBPOM di Makassar dari Badan POM RI	A
<b>Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan</b>			
1	Meningkatnya Kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	1 Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter	4300 Sampel
		2 Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor	100%
		Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	14.67%
		Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	31.38%
2	Meningkatnya Kualitas sarana produksi yang memenuhi standar		
3	Meningkatnya Kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar		
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	14 Perkara
<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat</b>			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1 Jumlah layanan publik BB/BPOM	746
		2 Jumlah Komunitas yang diberdayakan	23 Komunitas
<b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM</b>			
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	84.00%
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10

Kegiatan

Anggaran Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Makassar: Rp41,050,832,000.00

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Makassar,  
Kepala Balai Besar POM di Makassar

Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P  
NIP. 19620501 198703 1 002

Dr. MUHAMMAD GUNTUR  
NIP. 19601201 198703 1 002

LAMPIRAN 3

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR

NO.	SASARAN STRATEGIS/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
<b>SASARAN STRATEGIS</b>						
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	95.00 %	97.78 %	102.92 %
		2	Persentase Produk Obat Tradisional Yang memenuhi Syarat	85.00 %	90 %	106.34 %
		3	Persentase Produk Kosmetik yang memenuhi syarat	95.00 %	98.69 %	103.88 %
		4	Persentase Produk Suplemen Kesehatan yang memenuhi	95.00 %	98.14 %	103.30 %
		5	Persentase Produk Makanan yang memenuhi syarat	89.00 %	90.93 %	102.17 %
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	1	Tingkat Kepuasan Masyarakat	80.00 %	87.07 %	108.84 %
		2	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan Nilai SAKIP BBPOM di Makassar dari Badan POM RI	4.00 Kab/Kota	4 Kab/Kota	100 %
3	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan		A	BB	87.84 %	
<b>Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan</b>						
1	Meningkatnya Kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	4300 Sampel	4065 Sampel	94.53 %
		2	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik	100 %	0 %	0 %
2	Meningkatnya Kualitas sarana produksi yang memenuhi standar Makanan		Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	14.67 %	19.39 %	132.16 %
			Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	31.38 %	40.20 %	128.10 %
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Obat dan Makanan		Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	14 Perkara	14 Perkara	100.00 %
			Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1	Jumlah layanan publik BB/BPOM	764 Layanan	794 Layanan	103.93 %
		2	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	23 Komunitas	24 Komunitas	104 %
<b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM</b>						
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan		Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	84.00 %	81.33 %	96.82 %
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10 Dokumen	10 Dokumen	100 %

Kegiatan

Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Makassar

Realisasi Anggaran Kegiatan

: Rp41,050,832,000.00

: Rp37,093,616,332.00



**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR  
TAHUN 2017**

Unit Organisasi  
Tahun Anggaran

: Balai Besar POM di Makassar  
: 2017

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%	
<b>Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan</b>								
1	Meningkatnya Kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan	1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	Input : Dana	Rp 5,305,293,000	Rp 4,693,724,805	88.47
			2	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	Output : Jumlah sampel	4300	4065	94.53
2	Meningkatnya Kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Pengawasan Sarana Produksi Obat, OT, Kosmetik, NAPIZA, Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan		Input : Dana	Rp 267,872,000	Rp 220,828,094	82.44
			Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan		Output : Jumlah Sarana	115	152	132.17
3	Meningkatnya Kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Pemeriksaan Sarana Distribusi OHKA dan NAPIZA oleh Petugas Balai (Dalam dan Luar Kota) di Provinsi SulselBar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan		Input : Dana	Rp 1,533,416,000	Rp 1,493,684,030	97.41
			Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan		Output : Jumlah Sarana	1545	1981	128.22
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Obat dan Makanan	Investigasi awal, Penyelidikan dan Penyidikan	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan		Input : Dana	Rp 1,565,855,000	Rp 1,005,876,934	64.24
			Jumlah Perkara		Output : Jumlah Perkara	14	14	100.00
<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat</b>								
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Layanan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	1	Jumlah layanan publik BB/BPOM	Input : Dana	Rp 3,233,857,000	Rp 3,087,383,633	95.47
			Jumlah Layanan		Output : Jumlah Layanan	764	794	103.93
2	Desa/Kelurahan yang Dintervensi Program Keamanan Pangan	Desa/Kelurahan yang Dintervensi Program Keamanan Pangan	Jumlah Komunitas yang diberdayakan		Input : Dana	Rp 1,087,134,000	Rp 883,603,065	81.28
			Jumlah Komunitas		Output : Jumlah Komunitas	23	24	104.35
<b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Makassar</b>								
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Sarana dan prasarana yang terkait OM, Layanan perkantoran, perangkat pengolah data dan komunikasi, Peralatan dan fasilitas perkantoran, Gedung / Bangunan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar		Input : Dana	Rp25,598,184,000	Rp23,369,395,421	91.29
			Jumlah dokumen perencanaan, pengawasan, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu		Output : Persentase Pemenuhan	84.00	81.33	96.82
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dihasilkan	Jumlah dokumen perencanaan, pengawasan, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu		Input : Dana	Rp 2,459,221,000	Rp 2,339,120,350	95.12
			Jumlah Dokumen		Output : Jumlah Dokumen	10	10	100.00

**Kegiatan**

Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besa  
Realisasi Anggaran Kegiatan

:  
:

Rp41,050,832,000.00  
Rp37,093,616,332.00

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR  
TAHUN 2017**

Unit Organisasi : Balai Besar POM di Makassar  
Tahun Anggaran : 2017

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%	
1	Meningkatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan	1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	Input : Dana Output : Jumlah sampel	Rp 5,305,293,000 Rp 4,693,724,805	88,47	
			2	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	Input : Dana Output : Jumlah Sarana	4300 Rp 267,872,000 115	4065 Rp 220,828,094 152	94,53 82,44 132,17
			Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan		Input : Dana Output : Jumlah Sarana	Rp 1,533,416,000 Rp 1,493,684,030 1545	Rp 1,005,876,934 1981	97,41 128,22
			Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan		Input : Dana Output : Jumlah Perkara	Rp 1,565,855,000 Rp 1,005,876,934 14	Rp 1,005,876,934 14	64,24 100,00
			Jumlah layanan publik BB/BPOM		Input : Dana Output : Jumlah Layanan	Rp 3,233,857,000 Rp 3,087,383,633 764	Rp 3,087,383,633 794	95,47 103,93
			Jumlah Komunitas yang diberdayakan		Input : Dana Output : Jumlah Komunitas	Rp 1,087,134,000 Rp 883,603,065 23	Rp 883,603,065 24	81,28 104,35
			Jumlah dokumen perencanaan, pengawasan, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu		Input : Dana Output : Jumlah Dokumen	Rp 2,459,221,000 Rp 2,339,120,350 10	Rp 2,339,120,350 10	95,12 100,00
			Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar		Input : Dana Output : Persentase Pemenuhan	Rp 25,598,184,000 Rp 25,598,184,000 84,00	Rp 23,369,395,421 81,33	91,29 96,82
			Jumlah dokumen perencanaan, pengawasan, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu		Input : Dana Output : Jumlah Dokumen	Rp 2,459,221,000 Rp 2,339,120,350 10	Rp 2,339,120,350 10	95,12 100,00
			Jumlah layanan publik BB/BPOM		Input : Dana Output : Jumlah Layanan	Rp 3,233,857,000 Rp 3,087,383,633 764	Rp 3,087,383,633 794	95,47 103,93
			Jumlah Komunitas yang diberdayakan		Input : Dana Output : Jumlah Komunitas	Rp 1,087,134,000 Rp 883,603,065 23	Rp 883,603,065 24	81,28 104,35

Kegiatan :  
Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besa : Rp41,050,832,000.00  
Realisasi Anggaran Kegiatan : Rp37,093,616,332.00

## LAMPIRAN 6

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR  
TAHUN 2017**

Unit Organisasi : Balai Besar POM di Makassar  
Tahun Anggaran : 2017

NO.	SASARAN STRATEGIS/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	Bobot	NPS	
<b>SASARAN STRATEGIS</b>								
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	95.00 %	97.78 %	102.92 %	0.2	103.723
		2	Persentase Produk Obat Tradisional Yang memenuhi Syarat	85.00 %	90.39 %	106.34 %	0.2	
		3	Persentase Produk Kosmetik yang memenuhi syarat	95.00 %	98.69 %	103.88 %	0.2	
		4	Persentase Produk Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	95.00 %	98.14 %	103.30 %	0.2	
		5	Persentase Produk Makanan yang memenuhi syarat	89.00 %	90.93 %	102.17 %	0.2	
2	Meningkatnya Jaminan Kualitas Pembinaan dan Bimbingan dalam mendorong Kemandirian Pelaku Usaha dan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1	Tingkat Kepuasan Masyarakat	80.00 %	87.07 %	108.84 %	0.5	104.419
		2	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	4.00 Kab/Kota	4.00 Kab/Kota	100 %	0.5	
3	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan	Nilai SAKIP BBPOM di Makassar dari Badan POM RI		A	BB	87.84 %	1	87.84



**BALAI BESAR POM DI MAKASSAR**

Jl. Bajiminasa No. 2 Makassar

Telp. (0411) 871115, 879043

Fax. (0411) 873496

e\_mail : kepeg\_bbpommks@yahoo.com .